



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PADANG)

SKRIPSI



**LIONA EFRINA. S
04153001**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

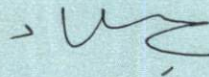
Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : Liona Efrina. S
No. BP : 04 153 001
Program Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang)

Telah disajikan dalam Seminar Jurusan Akuntansi dan disetujui oleh Pembimbing Skripsi.

Padang, 27 Januari 2011

Pembimbing



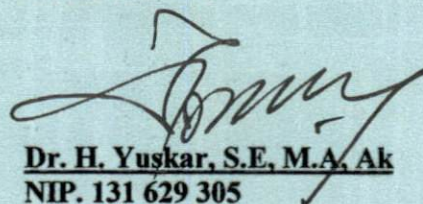
Drs. Suhandha, M.Si, Ak
NIP. 196 912 201 995 121 001

Mengetahui :



Dr.H. Syafruddin Karimi, S.E, M.A
NIP.130 892 743

Ketua Jurusan



Dr. H. Yuskar, S.E, M.A, Ak
NIP. 131 629 305

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan difokuskan hanya pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang dan untuk mengetahui kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan pada 3 (Tiga) Dinas/badan yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang sebagai dinas/badan yang fokus kinerjanya pada proses Perencanaan, sedangkan Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang sebagai dinas/badan yang fokus kinerjanya pada proses Penganggaran, dan Dinas Pendidikan (DIKNAS) Kota Padang sebagai salah satu dinas/badan yang fokus kinerjanya pada pelayanan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh data *input*, *output*, *outcome*, kegiatan pokok, proses, kinerja dan penilaian proses perencanaan dan penganggaran setiap dinas/badan yang diteliti. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk menentukan apakah terdapat kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang dan bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah. Hasil dari analisis ini didapat Penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD dalam perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Kota Padang dapat dikatakan sudah terwujud dengan baik, ini tercermin dari tingkat penilaian responden sebesar 77%. Dengan penilaian pada 6 (Enam) indikator, yaitu: Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih yang sudah mencapai 80%, Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana sudah mencapai 74%, Pengembangan Keuangan Daerah yang sudah mencapai 75 %, Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah sudah mencapai 75%, Proses Partisipasi Penyusunan Rencana sudah mencapai 80%, Kualitas Proses Pemikiran Rencana Strategis, sudah mencapai 85% sedangkan untuk Penilaian terhadap kinerja SDM Pemerintah Daerah (PEMDA) yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat disimpulkan berkinerja baik dengan perolehan tingkat penilaian responden sebesar 61%. Dengan penilaian pada 3 (Tiga) indikator, yaitu: Telah tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun yaitu 50%, Tercapainya target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan yang realistis yaitu 67%, Sitem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk 67%.

Keyword : Perencanaan dan Penganggaran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat & hidayahNya, membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Padang)”** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahilliyah sampai pada alam yang berpendidikan dan berteknologi seperti saat sekarang ini.

Selama penulisan Skripsi dan pelaksanaan penelitian hingga selesainya skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan baik berupa bimbingan, pengarahan, bantuan, kritikan-kritikan maupun saran-saran serta do'a dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, (Papa Samin Idris S,Pd dan Mama Arena Yati Sukma Tan A,Md.Pd) yang tak pernah lelah memberi do'a, perhatian, bimbingan, saran, motivasi, cinta, kasih sayang, kesabarannya dan semangat kepada penulis untuk mencapai apa yang penulis cita-citakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan mereka. Amin Ya Rabbal'alamin, dan terimakasih buat adik ku tercinta Jaya

Kasturi S (Une do'akan cepat dapat gelar Sarjana Hukum S.H yo dik, lanjutkan langsung S2 di Malaya, Good Luck My Brother...Luv U) atas segala dukungan, perhatian dan kasih sayang mu buat Une. Terimakasih juga buat NELI (Nenek lincah ku Hj. Rasyidah yang tak henti-hentinya setiap detik, menit, jam selalu menelpon penulis untuk mengingatkan penulis tetap semangat, shalat 5 waktu jangan lupa yo yon yo (Panggilan buat penulis "yon" dari seorang wanita yang sangat penulis kagumi karena melahirkan anak-anaknya yang sukses.

Om Prof. DR. H. Firwan Tan, SE, MEc, DEA, Ing yang begitu besar jasanya buat penulis terimakasih banyak om. Maktuo Khiarnis Tan A, Md. Pd yang cuek tapi sangat baik terimakasih do'anya. Mamok Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, SE, MA (jangan lupa janji mamok untuk menolong yona cari kerja) terimakasih do'anya mok. Mama tercinta Arena Yati Sukma Tan A,Md.Pd tak cukup hanya dengan 10 jari tangan, 10 jari kaki dan satu anggukan kepala bahwa mama memang wanita terbaik bahkan sangat terbaik buat anak-anaknya (dalam keadaan sakit mama selalu menyemangati dan memberikan nasehat buat anaknya) penulis persembahkan sujud untuk mama tercinta. Om Ir. Rafnir Tan SE,MM atas doanya.

Terimakasih juga buat kakek Tengku Ahmad Nurdin (Alm) dan kakek Idris Karim (Alm) yang hanya sebentar penulis bertemu dengan 2 sosok Pria yang begitu hebat (Cucumu akan selalu mendo'akan agar kakek-kakek hidup dengan tenang dialam sana...aku sangat menyayangimu kakek...Luv U Miss U). Terimakasih buat Nenek Halimah

Tusadiyah yang selalu mendo'akan cucu pertamanya (terus dan terus do'akan cucu mu ini No agar bisa menjadi kakak pertama yang bertanggungjawab atas adik-adiknya, insyaallah yona akan bahagiakan keluarga besar Idris Karim(Alm)). Terimakasih buat Tante Hj Fitrisia Firwan, Tante Cory, Tek Peri, Tante Inar (Alm), Tante Ma, Tante Yar atas do'anya.

Terimakasih juga buat sepupu-sepupu penulis Kak Fifin, Uni Eka, Kak Eca, Bg Robby, Da Rolly, Dek Loren, Dek Ledy, Dek Defril, Dek Dilla, Dek Nando, Dek Gian, Dek Raja, Dek Indah, Dek Evan Evin, Dek Deka, Dek Hoki, Dek Nabil, Dek Asraf, Dek Dila, dan keponakan tersayang Aurell dan Abell makasih supportnya.

2. Bapak Drs. Suhandi M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dorongan dan telah meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikirannya hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, S.E, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Jasrizal, SH. MA Bappeda Kota Padang, Ibu Elvira DPKA Kota Padang dan Ibu Anfadli Azhar Dinas Pendidikan, atas Pinjaman buku dan dokumen yang membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar FEUA yang telah mendidik dengan ilmu pengetahuan, baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

7. Staf Biro Jurusan Akuntansi (Bang Ari, Ni Eva, Bu Loli, dll) dan pengurus *Accounting Reading Room*. Terima kasih sudah membantu selama ini.
8. Keluarga Besar Papa Ir. Neldi Armon dan Mama Irdawati terimakasih do'a, saran, motivasi dan bantuannya.
9. Terimakasih buat Bg D.....I....T.....untuk dukungan, do'a, saran, motivasi, perhatian dan kebersamaannya selama ini
10. Teman-teman akuntansi angkatan 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya.
11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Amin.
Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 27 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah..... 7

1.3 Pembatasan Masalah..... 8

1.4 Tujuan Penelitian..... 9

1.5 Manfaat Penelitian..... 9

1.6 Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah..... 10

2.2 Konsep dan Komponen Perencanaan dan Penganggaran 12

2.2.1 Konsep Perencanaan 12

2.2.2 Konsep Penganggaran..... 14

2.2.3 Jenis Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah 16

2.2.4 Prinsip-prinsip Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	21
2.3 Proses/Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	25
2.4 Penilaian Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	46
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.2.1 Populasi Penelitian	46
3.2.2 Sampel Penelitian.....	46
3.3 Jenis Penelitian.....	47
3.3.1 Jenis Data	47
3.3.2 Sumber Data.....	48
3.4 Variabel Penelitian	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang	55
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Padang	55
4.1.2 Kondisi Geografis	56
4.1.3 Kondisi Demografi.....	59
4.1.4 Kondisi Perekonomiaan Kota padang.....	60
4.1.5 Kondisis Keuangan dan Pembangunan	61
4.2 Proses/Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Padang.....	63

4.3	Analisis Data dan Pembahasan	86
4.3.1	Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	86
4.3.2	Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemerintah daerah Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran	92

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	109
5.2	Implikasi dan Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Struktur APBD Menurut PP No.58 tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, dan Permendagri No. 59 Tahun 2007	43
Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)	50
Tabel 3.2 Kerangka Pengukuran Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemda terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran.....	51
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)	53
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemda terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran.....	54
Tabel 4.1 Kondisi Geografis Kota Padang.....	59
Tabel 4.2 Ibu Kota Kecamatan, Luas Wilayah, Banyaknya Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Padang Tahun 2008.....	60
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2004 - 2008	60
Tabel 4.4 Distribusi Persentase PDRB Kota Padang atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2008	61
Tabel 4.5 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2010 dan APBD Tahun 2009	62
Tabel 4.6 Hasil Musrenbang Tahun 2010 untuk SKPD Dinas Pendidikan ..	66

Tabel 4.7	Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2010-2014	74
Tabel 4.8	Perkiraan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2010-2014.....	75
Table 4.9	Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 20010-2014.....	76
Tabel 4.10	Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2010-2014.....	77
Tabel 4.11	Kejelasan Visi, Misi, dan Agenda Kepala Daerah Terpilih.....	87
Tabel 4.12	Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana.....	87
Tabel 4.13	Pengembangan Keuangan Daerah.....	88
Tabel 4.14	Isu Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah.....	88
Tabel 4.15	Proses Politisi dan Partisipasi Penyusunan Rencana.....	89
Tabel 4.16	Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana.....	90
Tabel 4.17	Hasil Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).....	91
Tabel 4.18	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Multi-tahun.....	93
Tabel 4.19	Jadwal Penyusunan APBD Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005.....	97
Tabel 4.20	Target Anggaran yang Layak dan Berdasarkan Proses Penyusunan Anggaran yang Realistis.....	99
Tabel 4.21	Total Anggaran Belanja APBD dan Realisasi Belanja APBD Kota Padang Tahun 2007-2009	101
Tabel 4.22	Total Anggaran Pendapatan APBD dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Padang Tahun 2007-2009.....	101

Tabel 4.23	Perbedaan APBD Induk dengan APBD Perubahan untuk Kelompok Belanja Langsung Kota Padang Tahun 2009-2010...	103
Tabel 4.24	Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang Komprehensif dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Telah Terbentuk.....	104
Tabel 4.25	Hasil Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemda terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Prosedur Perencanaan dan Penganggaran	66
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kertas Kerja Skoring Penilaian Dokumen RPJMD
- Lampiran 2 Indikasi Program dan Pendanaan Tahun 2009-2014
- Lampiran 3 Matrik Indikator Kinerja RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014
- Lampiran 4 Matrik Indikator Pengukuran Kinerja RPJMD Tahun 2009-2014
- Lampiran 5 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Belanja Langsung Menurut
Urutan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2010
(Dokumen RKPD)
- Lampiran 6 Program Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2008-
2010 (Dokumen Renstra dan Renja SKPD)
- Lampiran 7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2010
(Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD Per Triwulan)
- Lampiran 8 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2010
- Lampiran 9 Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2007
- Lampiran 10 Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2008
- Lampiran 11 Ringkasan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2008
- Lampiran 12 Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 13 Ringkasan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 14 Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2010
- Lampiran 15 Ringkasan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang dimulai pada Tahun 2000, yang telah berjalan lebih kurang 10 tahun di Indonesia telah terasa manfaatnya hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Bergulirnya Era Reformasi tersebut telah memberikan warna baru dalam penataan pemerintahan daerah di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum reformasi kebanyakan Pemerintah Daerah di Indonesia cenderung hanya sebagai “perpanjangan tangan” Pemerintah Pusat. Reformasi pada dasarnya adalah sebuah sinyal positif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menata dan memberdayakan sumber daya daerahnya sesuai dengan kondisi dan kapabilitas daerah masing-masing, atau yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah atau disingkat dengan OTDA. Daerah dalam konsep OTDA diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri dan mampu mengkreasi strategi pencapaian tujuan tersebut.

Dalam Era Reformasi dan pelaksanaan OTDA telah membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pemerintahan yang baik dari kaca mata teoritis diidentifikasikan terwujudnya prinsip-prinsip “*good governance*” dalam kehidupan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Terselenggaranya *good governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa negara.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip "*good governance*". Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan ini juga dilatarbelakangi masih digunakannya peraturan perundang-undangan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* dan untuk saat ini, kebijakan ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan semakin kompleksnya pengelolaan keuangan sebuah negara sampai ke daerah-daerah.

Pada Tahun 2003 dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan UU tersebut dituntut reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan "*good governance*". Dalam konteks ini maka reformasi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara:

- 1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum,
- 2) Penataan kelembagaan,
- 3) Penataan sistem pengelolaan keuangan negara, dan
- 4) Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Ruang lingkup sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, tersebut meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan
- 3) Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- 4) Pengawasan Keuangan Daerah

Selanjutnya melalui UU No. 32 Tahun 2004 penerapan OTDA semakin diperjelas dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dengan demikian maka proses perencanaan dan penganggaran merupakan proses pertama yang sangat penting dari pengelolaan keuangan daerah, dan siklus APBD.

Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Kota, wajib dituangkan dalam suatu rencana kerja. Rencana kerja yang dimaksud terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk masa 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk masa 5 tahun, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) untuk masa 1 tahun. Di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk rencana jangka menengah disebut dengan istilah dokumen Rencana Strategis (RENSRA) SKPD dan untuk rencana kerja tahunan disebut dengan istilah dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Menurut UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan dan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Persoalan penganggaran pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah perencanaan daerah. Jika penganggaran tersusun dengan baik dan mampu direalisasikan oleh PEMDA maka dapat dikatakan bahwa program-program yang direncanakan akan dapat pula direalisasikan dengan baik dan efektif, RKPD dalam hubungan ini menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Didalam RAPBD terdapat berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat/stakeholders melalui instansi atau SKPD yang terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan apa yang digariskan dalam visi dan misi Pembangunan Daerah, baik Kabupaten maupun Kota.

Penganggaran merupakan suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya masing-masing kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu dengan standar biaya yang berlaku. Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang, dengan kewenangan yang dimiliki saat ini pemerintah daerah dapat menyusun struktur anggaran yang memungkinkan masyarakat dan manajemen pemerintah daerah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebelum kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat dan stakeholders yang lain menjelma menjadi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang siap dioperasikan dalam proses penganggaran, sesungguhnya telah melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang baik untuk kepentingan publik atau masyarakat banyak. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efisien dan efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimilikinya tidak sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran yang benar.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan lebih memudahkan dalam pengimplementasian program-program yang telah disepakati bersama. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Padang disyalirkan belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan peranan secara efisien dan efektif khususnya dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Ini tercermin dari terdapatnya indikasi Program-program Pembangunan Sektorial belum konsisten dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana termuat didalam RPJMD. Kondisi yang demikian diperkirakan penyebabnya adalah:

Pertama, kurangnya tenaga yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang memadai merupakan hambatan besar dalam meraih kinerja yang baik (kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan factor pendorong utama upaya peningkatan hasil pengelolaan keuangan yang baik di aspek perencanaan dan penganggaran).

Kedua, perencanaan dibatasi oleh anggaran (keterbatasan dana, pembatasan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) dan penganggaran yang realistis (perbedaan besar antara pengeluaran yang direncanakan dengan yang terealisasi pada siklus anggaran menunjukkan kurangnya kapasitas untuk membuat anggaran yang realistis).

Ketiga, kualitas dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD seringkali belum optimal (kelemahan dalam penyusunan Rencana yaitu indikator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur, data dasar dan asumsi kurang valid), serta ada kecenderungan dokumen RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya.

Keempat, partisipasi masyarakat/stakeholders dalam proses perencanaan masih sering diabaikan, dan kurangnya transparansi keterlibatan public dan pengawasan keuangan oleh public. Proses perencanaan dan penganggaran daerah bukan saja masalah kepatuhan hukum pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan dan penganggaran daerah lebih pada proses dan kinerja pemerintahan daerah untuk meningkatkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan public, tetapi ada beberapa daerah telah mengembangkan kebijakan yang menjamin transparansi dokumen public, namun informasi keuangan pemerintah daerah terkadang sulit diakses oleh masyarakat, dan media dan dokumen anggaran masih sangat sulit diperoleh oleh masyarakat.

Masalah lain yang sering muncul dalam proses perencanaan adalah masalah kualitas. Proses perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan

rencana yang berkualitas dan dokumen perencanaan yang berkualitas. Rencana yang berkualitas akan cenderung bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari suatu rencana. Begitu juga sebaliknya, hal yang sering terjadi pada proses penyusunan rencana, kualitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga akan menghasilkan rencana yang tidak berkualitas dan dokumen yang tidak berkualitas.

Proses perencanaan dan penganggaran daerah bukan saja masalah kepatuhan hukum pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan dan penganggaran daerah lebih pada proses dan kinerja pemerintahan daerah untuk meningkatkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan public.

Dari permasalahan tersebut diatas maka diperlukan kajian akademis tentang proses perencanaan dan penganggaran yang seharusnya dilakukan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis sistem akuntansi yang benar untuk pembangunan daerah/kota. Untuk itu, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat tema penelitian yang berjudul **“Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan utama yang akan dicarikan pemecahannya dan menjadi focus dari penelitian ini. Permasalahan utama yang dimaksud adalah: *Pertama*, terdapat indikasi bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Padang

belum begitu lengkap sebagaimana yang disesuaikan dengan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang mendasarinya dan oleh teori perencanaan dan penganggaran. Hal ini menyebabkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Padang belum bisa dikatakan relatif baik. *Kedua*, Diduga bahwa kesalahan-kesahan dalam pendokumentasian dan penyusunan perencanaan dan penganggaran ini sangat terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang bertugas. Untuk itu persoalan SDM juga menjadi focus permasalahan yang diteliti dalam studi ini. Perencanaan dan Penganggaran yang benar dan berkualitas sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah Kota Padang. Hal ini penting mengingat meningkat dan tingginya kontrol dari masyarakat terhadap perencanaan dan penganggaran yang tepat.

1.3 Pembatasan Masalah

Walaupun disadari bahwa persoalan Perencanaan dan Penganggaran sangatlah luas. Namun dalam penelitian ini hanya dititik beratkan pada dua aspek permasalahan utama yaitu: kelengkapan dan kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang, dan kinerja SDM yang bertugas dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Padang. Dokumen yang diteliti dalam hal ini hanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang (RPJMD-Kota Padang). Dokumen lainnya seperti dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum bisa diteliti karna waktu penelitian yang cukup singkat.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, dapat dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan. Dalam penelitian ini difokuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang.
2. Mengetahui kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini sangat bermanfaat terutama untuk:

- 1) Masukan bagi PEMDA Kota Padang dalam rangka peningkatan kelengkapan dan kualitas dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Padang dan peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Padang
- 2) Masukan bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian yang lebih luas.
- 3) Syarat bagi penulis sehingga mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dalam keahlian Akuntansi.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** :Pendahuluan yang membahas tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** :Landasan teori yang mengungkapkan tentang konsep pengelolaan keuangan daerah, konsep perencanaan dan penganggaran, proses atau prosedur perencanaan dan penganggaran daerah, dan penilaian proses perencanaan dan penganggaran daerah.
- BAB III** :Metode penelitian yang menggarisbawahi tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis penelitian berupa jenis data dan sumber data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.
- BAB IV** :Pembahasan tentang elaborasi hasil penelitian. Dimulai dengan bahasan yang terkait dengan gambaran umum Pembangunan ekonomi dalam kontek Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang proses atau prosedur perencanaan dan penganggaran dan seterusnya penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD. Pada akhirnya dikaji tentang kinerja SDM Pemda yang bertugas dalam proses Perencanaan dan Penganggaran.
- BAB V** :Pada bagian ini adalah Bab Penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. World Bank (1998:46), menyebutkan bahwa:

“Dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi, dan informatif”

Mardiasmo (2004:13) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*)
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran pada daerah khususnya
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, DPRD, sekda, dan perangkat daerah lainnya
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar perimbangannya.
- 6) Ketentuan bentuk dan struktur anggaran, anggaran kerja dan anggaran multi tahunan.
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.

Menurut Tim Pusat Studi antar Universitas Gadjah Mada dalam Oktora (2004, 19), ada tiga tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Masing-masing tahap tersebut memiliki *input*, *proses*, dan *output*. Tahap perencanaan menggunakan *input* yang berupa hasil aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh dewan dan Eksekutif dan dijabarkan dalam usulan kegiatan atau aktivitas Unit Kerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJM, RKPD, KUA dan PPAS. *Input* tersebut kemudian di *proses* dengan Standar Analisis belanja (SAB) sehingga setiap aktivitas mencerminkan *input* kinerja dan anggaran yang diusulkan serta mencerminkan anggaran kinerja. Tercantumnya Pernyataan Anggaran (PA) pada setiap Unit kerja akan menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) yang kemudian di *proses* lagi sampai akhirnya menghasilkan *output* berupa APBD.

Pada tahap pelaksanaan, *inputnya* adalah *output* dari tahap perencanaan yaitu APBD, sedangkan proses dalam tahap pelaksanaan ini yaitu APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan. Proses tersebut kemudian akan menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai Laporan Pelaksanaan APBD oleh Eksekutif, baik berupa laporan triwulan maupun tahunan. Laporan tahunan sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Untuk tahap pengendalian, *inputnya* berupa Laporan Pelaksanaan APBD yang kemudian diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Laporan pelaksanaan APBD tersebut digunakan untuk menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah. *Outputnya* pada tahap pengendalian ini

berupa keputusan hasil evaluasi ataupun penerimaan serta penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

2.2 Konsep dan Komponen Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga perencanaan dan penganggaran daerah merupakan dua siklus yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen. Ditinjau dari sisi manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan. Menurut perencanaan (strategis), pendanaan suatu strategi harus terjamin. Sistem penganggaran juga memandang bahwa setiap pengeluaran anggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas mengapa muncul suatu mata anggaran (Munir, dkk, 2005).

Dalam pelaksanaan selanjutnya, proses perencanaan dan penganggaran di daerah membutuhkan sistem pengendalian agar perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mengacu pada tujuan tersebut, proses perencanaan daerah tidak dapat lepas dari sistem pengendalian aktivitas, sedangkan penganggaran daerah terkait erat dengan sistem pengendalian keuangan dimana hubungan kedua proses itu telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN)*.

2.2.1 Konsep Perencanaan

Perencanaan, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN merupakan suatu *“proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang*

tersedia". Perencanaan sangat penting sebagai salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan sangat bermanfaat dalam:

- 1) Mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa datang,
- 2) Mengarahkan semua aktivitas pada pencapaian visi dan misi organisasi,
- 3) Sebagai wahana untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu organisasi.

Dalam ilmu manajemen, siklus pembangunan diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dari ketiga tahap ini, perencanaan merupakan hal yang paling penting dan harus dilakukan secara cermat, tepat, dan akurat karena melalui perencanaan inilah akan diperoleh arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Menurut Conyers & Hills (1994:34) bahwa:

"Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang"

Perencanaan Daerah adalah sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang bersangkutan. Manfaat Perencanaan Daerah adalah:

- 1) Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2) Sebagai alat ukur, standar pengawasan, atau evaluasi.
- 3) Sebagai bahan perkiraan penentuan alternatif terbaik dalam skala penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia.
- 4) Mencegah terciptanya jurang kemakmuran antar daerah.
- 5) Melestarikan kebudayaan setempat.
- 6) Dapat menghindarkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat tercapai.

Tujuan Perencanaan Daerah adalah mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

2.2.2 Konsep Penganggaran

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah adalah perencanaan (yang didalamnya terdapat proses penyusunan anggaran). Untuk itu, pemerintah setiap tahun memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menyusun anggaran. Anggaran yang disusun oleh pemerintah merupakan wujud perencanaan pembangunan tahunan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan tugas kenegaraan selama satu tahun.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara/daerah perlu dibuat rencana tersebut dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Penyusunan anggaran tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Bastian (2001: 79), mendefinisikan:

“anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.

Menurut Bastian (2006:25) yang mendefinisikan,

“Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu”.

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan serta sebagai alat

pengendalian. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan maupun pengawasan.

Fungsi lainnya, sebagai:

1) Instrumen Politik

Anggaran adalah salah satu instrumen formal yang mewujudkan *bargaining* eksekutif dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislatif daerah.

2) Instrumen Kebijakan Fiskal

Dengan mengubah prioritas yang besarnya alokasi dana, anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan hasil-hasilnya.

3) Instrumen Perencanaan

Didalam anggaran disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja.

4) Instrumen Pengendalian

Dalam anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar unit kerja tidak melakukan *overspending, underspending* atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

Sebagai sebuah sistem, penganggaran telah mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika perkembangan sektor publik dan perkembangan yang muncul di masyarakat. Perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan

adanya perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran dengan konsep *Performance Budgeting* yang berorientasi pada kinerja. Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.2.3 Jenis Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Sistem perencanaan dan penganggaran adalah suatu prosedur kerja untuk menyusun anggaran dan saling berkaitan serta saling keterkaitan. Jenis sistem penganggaran Menurut Bastian (2006, 145-148) tersebut, terdiri dari:

1) *Line Item Budgeting*.

Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan kepada dan dimana itu berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Anggaran ini menggunakan struktur *line item* disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran. Metode ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode mendatang. Keunggulannya:

- a) Penyusunannya relatif mudah
- b) Membantu dalam mengamankan komitmen diantara partisipasi sehingga dapat mengurangi konflik.

Kelemahannya:

- a) Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat kurang.
- b) Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.
- c) Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

2) *Incremental Budgeting*.

Jenis anggaran ini hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Alasan diterapkannya anggaran ini bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya. Keunggulannya:

- a) Membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran.
- b) Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program baru.

Kelemahannya:

- a) Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.
- b) Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.
- c) Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat kurang.

3) *Planning Programing Budgeting System (PPBS).*

PPBS adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan, proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan proses pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan dimasa yang akan datang. Keunggulannya:

- a) Dapat menggambarkan tujuan organisasi dengan lebih nyata.

- b) Dapat menghindarkan adanya *overlapping* program dan pertentangan diantara program.
- c) Dapat memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif berdasarkan analisa manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan.

Kelemahannya:

- a) Terlalu sukar untuk diterapkan baik secara teknis maupun praktis sehingga sulit diterapkan khususnya dinegara-negara berkembang.
- b) Merupakan proses yang multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan dan analisa.
- c) Memerlukan kualitas pengelolaan yang sangat tinggi.

4) *Zero Base Budgeting (ZBB)*.

ZBB adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada sesuatu yang sedang dilakukan dan merupakan sesuatu yang baru, dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Konsep *Zero Base Budgeting (ZBB)* ini tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran berdasarkan pada kebutuhan saat ini.

Keunggulannya:

- a) Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen.
- b) Dana dapat dialokasikan dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif bagi pelaksanaan keputusan tersebut.
- c) Setiap program dan kegiatan selalu di *review* setiap tahun.

- d) Pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dianggap kritik dan mendesak.

Kelemahannya:

- a) Tidak mudah diterapkan.
- b) Tidak semua kegiatan dapat disusun ranking keputusannya secara konsisten dari tahun ke tahun.
- c) Terlalu mahal dan memakan banyak waktu.
- d) Memerlukan skill/ khusus dalam menganalisa dan menentukan prioritas.
- e) Memerlukan data yang lebih banyak dan diperlukan dukungan analisis yang cukup kuat.
- f) Sulit untuk memutuskan bahwa kegiatan yang satu benar-benar lebih penting dibandingkan kegiatan yang lainnya.

5) *Performance Budgeting System (PBS)*.

PBS adalah cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value of money* dan efektifitas anggaran.

Keunggulannya:

- a) Memungkinkan adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.

- b) Merangsang partisipasi dan motivasi unit-unit operasional melalui proses usulan dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
- c) Dapat membantu meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada semua tingkat.
- d) Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi.
- e) Dapat menghindarkan pemborosan.

Kelemahannya:

- a) Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan.
- b) Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.
- c) Tidak ada kejelasan mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban atas keputusan.

Selain kelima jenis sistem penganggaran yang dikemukakan oleh Bastian (2006, 145-148), menambahkan satu jenis sistem penganggaran, yaitu *Medium Term Expenditure Framework (MTEF)*. Hal ini menyebabkan timbulnya tanggung jawab departemen yang lebih besar untuk menetapkan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keberhasilan dari *Medium Term Expenditure Framework (MTEF)* ini tergantung kepada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara *agregat* yang didasarkan pada skala prioritas.

2.2.4 Prinsip-prinsip Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Walikota No.12.A Tahun 2008) bahwa dalam Pengelolaan Keuangan daerah terkait penyusunan APBD perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran mencerminkan hubungan masyarakat sebagai penyumbang pemasukan APBD terbesar dari dana pajak dan retribusi dan pemerintah sebagai pelaksana amanat masyarakat. Usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam tahapan perencanaan patut direspon oleh pemerintah sehingga kegiatan yang direalisasikan dalam APBD mewujudkan wujud aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya. Tujuan umum yang ingin dicapai dari pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah terciptanya suatu kondisi anggaran yang murni sehingga dapat menciptakan mekanisme pelaksanaan anggaran yang transparan.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang diinginkan dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan/ditetapkan.

3) Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4) Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan-pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain ini, dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

5) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Pemanfaatan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat, oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran daerah perlu diperhatikan:

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indicator kinerja yang ingin dicapai,
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6) Taat Azas

Sebagai rencana tahunan pemerintahan daerah, APBD ditetapkan sebagai peraturan daerah dengan memperhatikan:

- a) APBD yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. APBD harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan peraturan pemerintah yang ada yang diakui memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu rencana peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan publik bukan membebani masyarakat.
- c) Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya.

2.3 Proses/Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa penganggaran merupakan proses kegiatan yang berdiri sendiri, tidak memiliki keterkaitan dengan system perencanaan daerah. Padahal penganggaran merupakan komponen yang penting dalam proses perencanaan. Hal ini dikarenakan, sejalan dengan proses tahapan penyusunan dan penetapan perencanaan, terdapat juga proses tahapan yaitu penyusunan kebijakan, penyusunan program, penyusunan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi serta penyempurnaan program.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks ini, maka perencanaan juga perlu mempertimbangkan prinsip keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran. Keduanya merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah yang efisien dan efektif. Hasil terbaik akan dicapai apabila terhadap keduanya diberikan perhatian yang seimbang. Penganggaran tidak selayaknya mendikte proses perencanaan. Dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Menurut Halim (2001 : 19) mengatakan bahwa, Proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan untuk menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab akan “kepentingan rakyat” pemerintah daerah dan DPRD harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat. Selain itu, hal tersebut adalah sebuah peluang untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bukan

sebagai salah satu “penikmat” dana rakyat, akan tetapi dapat berbagi rasa dengan rakyat dari dana yang tersedia bagi daerah. Berkaitan dengan adanya tuntutan terciptanya akuntabilitas public maka DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Fungsi perencanaan anggaran daerah hendaknya sudah dilakukan oleh para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan lebih memudahkan dalam pengimplementasian program-program yang telah disepakati bersama. Keterlibatan berbagai lembaga/instansi dalam proses perencanaan diperlukan visi, misi dan tujuan dari setiap lembaga tersebut.

Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki sejumlah bentuk utama antara lain:

- 1) Terdapat sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintahan daerah. Dokumen ini juga menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran sebelum ditetapkan APBD
- 2) Terdapat periodisasi waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk menjamin tepat waktunya penetapan APBD
- 3) Terdapat dokumen perencanaan menurut periode waktu perencanaan baik di tingkat pemerintahan daerah maupun Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD).

Namun sebelum proses perencanaan dan penganggaran berbentuk menjadi kegiatan yang siap dilaksanakan dari penyusunan anggaran satuan kerja sampai

dengan penetapan anggaran, terdapat proses yang tidak dapat dipisahkan yaitu adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, diteruskan ke tingkat Kecamatan dan akhirnya ditingkat Kota.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh elemen yang menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1) Maksud dan Tujuan

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan prioritas kepala daerah, kerangka kebijakan, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM disepakati sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra SKPD.

2) Kedudukan dan Fungsi

RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai:

- a) Acuan penyusunan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.
- b) Pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD.

3) Tahap Penyusunan Dokumen

Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa penyusunan RPJM Nasional/ Daerah dan RKP/ RKPD dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan
- b) Penyiapan Rancangan Rencana Kerja
- c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan
- d) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

Secara teknis, tahapan penyusunan dokumennya adalah :

- a) Menjabarkan visi, misi, program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
- b) Mengisi Sunbstansi RPJM Daerah.

Materi utama RPJM Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- c) Strategi Pembangunan Daerah.
- d) Kebijakan Umum.
- e) Program Kepala Daerah yang sudah dijabarkan dalam format Program SKPD dan Program Lintas SKPD, Program Kewilayahan, serta

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah, menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja (Rencana Kerja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

RKPD ditetapkan dengan peraturan daerah, tata cara penyusunan RKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004, penyusunan RKPD dimulai dengan kegiatan Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, selanjutnya Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Setelah Renja SKPD tersusun, maka Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD. RKPD merupakan rencana kerja yang menjadi bahan utama dalam proses penganggaran penyusunan APBD.

1) Maksud dan Tujuan

Menyusun RKPD adalah menyiapkan dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RPJMD untuk tahun yang bersangkutan. RKPD yang telah ditetapkan dimaksudkan untuk digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD.

2) Kedudukan dan Fungsi

RKPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai:

- a) Acuan dalam penyusunan Kerangka Umum APBD
- b) Sigma program dan kegiatan dari seluruh Renja SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3) Tahapan Penyusunan Dokumen

Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan.
- b) Penyiapan Rancangan Rencana Kerja.
- c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan
- d) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

Secara teknis penyusunan dokumen rancangan awal RKPD adalah:

- 1) Memutuskan hasil evaluasi tahunan dalam rancangan RKPD.
- 2) Memasukkan umpan balik serta masukan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan terhadap rancangan awal RKPD.
- 3) Memasukkan masukan dari Musrenbag dalam rancangan RKPD.

- 4) Penggunaan daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam mengkaji rancangan awal APBD.
- 5) Memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD.

3. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan umum anggaran (KUA) adalah sebagai suatu sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum serta disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan APBD. Oleh karena itu, kebijakan umum anggaran merupakan bagian dari formulasi kebijakan, maka diharapkan kebijakan umum ini dapat menjebatani arah dan tujuan strategis dengan aspek penganggaran (rencana keuangan).

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD antara lain memuat :

- 1) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
- 2) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Teknis penyusunan APBD, dan
- 4) Hal-hal khusus lainnya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaan/pembiayaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD

yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Ruang lingkup penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Penyusunan kebijakan umum APBD memiliki mekanisme, yaitu:

- 1) Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri setiap tahun.
- 3) Kemudian Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan

pendanaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

- b) Rancangan KUA tersebut disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama pejabat perencana daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- c) Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni.
- d) Rancangan Kebijakan Umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- e) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati menjadi KUA.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan penggantian istilah yakni Arah dan Kebijakan Umum APBD (AKU), tidak ada perbedaan antara keduanya. AKU APBD maupun KUA dapat disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Konsistensi antar visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah/RPJM dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah lainnya.

- 2) Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
- 3) Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategis dan prioritas serta penyusunan rancangan APBD, serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.
- 4) Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- 5) Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaannya.

4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas merupakan upaya untuk mengutamakan sesuatu dibanding dengan yang lain sebagai proses yang dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting disertai dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan tetapi juga menentukan skala prioritas program atau kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu daripada program atau kegiatan yang lain.

Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian, serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realitis. Ruang lingkup penentuan prioritas meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemahaman terhadap situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut.
- 2) Perancangan berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan.
- 3) Identifikasi berbagai konsekuensi dari setiap alternatif yang akan dipilih.
- 4) Pembuatan keputusan tindakan terbaik yang akan dilakukan.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Penyusunan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara berpedoman pada ketentuan peraturan menteri tentang penyusunan APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 87 dengan tahapan:

- 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan,
- 2) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan, dan
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara masing-masing program.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Kemudian rancangan PPAS yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat akhir bulan Juli anggaran berjalan.

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD)

Rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Berdasarkan nota kesepakatan, Tim anggaran Pemerintah daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Hal ini penting, karena proses penyusunan dokumen anggaran setiap tahun dapat berubah-ubah secara teknis dan kebijakan anggaran serta pedoman penyusunan anggaran dari Depdagri harus disosialisasikan kepada seluruh SKPD. Rancangan surat edaran tersebut mencakup beberapa hal berikut:

- 1) PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan (Permendagri No.13 Tahun 2006).

Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

- 2) Sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).
- 3) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).
- 4) Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada Pejabat Pengelolaan keuangan daerah (PPKD).
- 5) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiesi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
- 6) Dokumen sebagai lampiran, meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan sebuah instrument pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Kebijakan suatu pemerintah membutuhkan sumber daya berupa alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan system perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu sangat penting bagi pihak yang

berkepentingan terhadap kebijakan public dalam memahami sistematika perencanaan yang bermuara pada anggaran.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu, dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

- 1) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat
- 2) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian,

3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu Negara dan daerah.

a) APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* dan PP No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan daerah*

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* dan PP No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan daerah* bahwa Pemerintah Daerah menuangkan penganggaran dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD). Perencanaan dan penganggaran daerah sebagai landasan dalam pengelolaan APBD bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

b) Struktur APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* dan PP No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan daerah*

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD ini berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan PP No. 58 Tahun 2005, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 58 Tahun 2005) yaitu semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.. Pendapatan daerah (Basis Kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b) Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah, terdiri dari: Hibah, Dana Darurat, Bantuan Dana, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja juga dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Belanja Daerah terdiri dari:

- a) Belanja Tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Jenis kelompok belanja tidak langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- b) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis kelompok belanja langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Pasal 60 ayat (1) Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 60 ayat(2) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Tabel 2.1
Struktur APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006,
Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 58 Tahun 2005

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....		
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran xxx/xxx		
Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	xxx	
Dana Perimbangan	xxx	
Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	
Total Pendapatan (1) =		xxxx
Belanja		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	xxx	
Belanja Barang dan Jasa	xxx	
Belanja Modal	xxx	
Belanja Tidak Langsung		
Belanja Bunga	xxx	
Belanja Subsidi	xxx	
Belanja Hibah	xxx	
Belanja Sosial	xxx	
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	xxx	
Belanja Tak Terduga	xxx	
Total Belanja (2) =		xxxx
Surplus (Defisit) (3) = (1) – (2)		xxxx
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan (4)	xxx	
Pengeluaran Pembiayaan (5)	xxx	
Pembiayaan Netto (6) = (4) – (5)		xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (7) = (3) + (6)		xxxx

Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

2.4 Penilaian Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya memiliki aspek yang multidimensional. Implikasinya, diperlukan penekanan dalam melakukan penilaian pengelolaan keuangan daerah terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran sehingga diharapkan mampu melakukan penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan daerah khususnya pada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kelengkapan dan Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh dokumen RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Untuk mengukur kualitas dokumen rencana strategis, Yeremias T Keban (2001 : 10) memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu dokumen rencana strategis. Suatu dokumen rencana strategis dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para *stake holders* nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada”

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah maka perlu perbaikan proses perencanaan dan penganggaran. Terkait dengan hal ini maka pada proses perencanaan dilakukan penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJM Daerah, dinilai dari:

- 1) Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih
- 2) Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana
- 3) Pengembangan Keuangan Daerah
- 4) Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah
- 5) Proses Partisipasi Penyusunan Rencana

6) Kualitas Proses Pemikiran Rencana Strategis

Selanjutnya penilaian terhadap kinerja SDM Pemerintah Daerah terkait pada aspek Perencanaan dan Penganggaran daerah. Focus penilaian terdiri dari:

- 1) Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun,
- 2) Target anggaran yang layak,
- 3) Serta proses pemantauan dan evaluasi yang transparan dan partisipatif.

Ketiga focus penilaian ini merupakan indikator penilaian terhadap kinerja SDM Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait proses Perencanaan dan Penganggaran secara umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Ditetapkannya Pemerintah Kota Padang sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan Kota Padang memiliki posisi strategis, yaitu sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat dan sekaligus sebagai sebuah kota besar dengan luas 1.414,96 Km². Kota padang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar telah mengalami perkembangan pada beberapa aspek kehidupan perkotaan. Pendapatan daerah dan sumber-sumber keuangan daerah perlu terus digali sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Padang perlu langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayanan masyarakat.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan daerah yang mengetahui tentang proses perencanaan dan penganggaran, yaitu kepala badan/dinas/instansi, kasubag dan staf pada badan/dinas di Pemerintah Kota Padang Sumatera Barat.

3.2.2 Sampel

Sampel penelitian ini adalah hanya pejabat yang terkait langsung dengan pengkoordinasi kegiatan yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada 3 (Tiga) dinas/badan yang terkait dalam pengelolaan keuangan

daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang, Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang, dan Dinas Pendidikan (DIKNAS) Kota Padang.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memberikan informasi yang diperlukan agar mengurangi generalisasi temuan (Sekaran, 2006:137).

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif yang meneliti tentang penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan penilaian terhadap kinerja SDM Pemerintah Daerah terkait proses Perencanaan dan Penganggaran. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, tujuan penelitian deskriptif untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subyek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur (Indriantoro dan Supomo, 1999:26)

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer (*Primary Data*) dan data sekunder (*Secondary Data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (responden). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, dimana

data yang diinginkan berkaitan dengan variabel penelitian. Pemilihan responden menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2005,56) mempunyai kriteria:

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati
- 2) Mereka tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
- 3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi
- 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun didalam arsip (data dokumenter).

3.3.2 Sumber Data

Pengumpulan data atau pengisian skor dilakukan dengan metode wawancara berdasarkan daftar pertanyaan dan panduan wawancara serta diskusi terarah dengan responden dari wakil dinas/badan yaitu Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), dan Dinas Pendidikan (DIKNAS) dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Serta, dilengkapi dengan studi dokumentasi yaitu pengumpulan dan penelaah data dan informasi yang terdapat dalam seluruh dokumen yang dihasilkan.

3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2006:115), variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Variabel ini diukur berdasarkan sumber dari *Depdagri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 pada tanggal 27 juni 2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)*. Untuk melakukan penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD, variabel penilaian/penelitian yaitu Dokumen perencanaan RPJMD, dengan 6 (Enam) sub variabel, yang terdiri dari Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih, Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana, Pengembangan Keuangan Daerah, Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah, Proses Partisipasi Penyusunan Rencana, dan Kualitas Proses Pemikiran Rencana Strategis serta terdapat 114 indikator pertanyaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Variabel	Sub Variabel	Jumlah Indikator
Dokumen Perencanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	A. Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih Total	4
	B. Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana Total	50
	C. Pengembangan Keuangan Daerah Total	22
	D. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah Total	13
	E. Proses Partisipasi Penyusunan Rencana Total	13
	F. Kualitas Proses Pemikiran Rencana Strategis Total	12
	TOTAL	114

- 2) Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran secara umum

Variabel ini diukur berdasarkan sumber yang dikembangkan oleh *Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia* untuk melakukan penilaian terhadap kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran. Variabel penilaian/penelitian yaitu perencanaan dan penganggaran, dengan 3 (Tiga) sub variabel, yang terdiri dari Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Multi-tahun, Target Anggaran yang Layak dan Berdasarkan Proses Penyusunan Anggaran yang Realistis serta Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang Komprehensif dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran telah Terbentuk, dengan 18 (Delapanbelas) indikator pertanyaan wawancara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemerintah Daerah terkait
Proses Perencanaan dan Penganggaran

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Jumlah Indikator
Perencanaan dan Penganggaran	1) Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun	1. RPJMD merupakan dokumen yang realistis serta berisi strategi, program & kegiatan yang terkait dengan sasaran 2. Program dan kegiatan dalam RPJMD merupakan dokumen yang dapat diukur secara kuantitatif 3. Kebijakan umum APBD (KUA) & PPAS mencakup indikatorr hasil yang dapat diukur 4. KUA & PPAS di susun sebelum proses RKA di SKPD di mulai 5. Dalam anggaran satuan kerja terdapat indikator-indikator hasil yang terukur dan merujuk pada strategi 6. Telah disusun analisis standar biaya	
	Total		6
	2) Target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan yang realistis	1. APBD disahkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender anggaran 2. Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi belanja tahun lalu kurang dari 10% 3. Rata-rata defisit realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir antara 0 sampai 3% dari PDRB 4. Perubahan anggaran tahun berjalan dilakukan berdasarkan alasan yang jelas sesuai dengan peraturan yang di dukung oleh LRA semester I 5. Perbedaan antara APBD induk dan APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung kurang dari 10% 6. Renstra & Renja SKPD memuat proyeksi biaya dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya	
	Total		6
	3) Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk	1. Terdapat proses evaluasi atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA dan PPAS 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah di akses oleh masyarakat 3. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD 4. Proses perencanaan anggaran mencakup komponen partisipatif 5. Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD 6. Peraturan daerah mengatur sistem pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran	
	Total		6
TOTAL			18

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis persentase sebagaimana dijelaskan oleh, Nasution (1986: 15) yaitu:

“Bila suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau menemukan sesuatu sebagaimana adanya tentang suatu objek yang diteliti, maka analisis yang dibutuhkan cukup analisis Persentase(%)”.

Untuk menilai jawaban responden, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Untuk penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dengan cara:

1) Penentuan skor

Dalam variabel penilaian ini terdapat 114 indikator pertanyaan untuk menilai ada atau tidak adanya suatu substansi kelengkapan dalam dokumen, dan untuk menilai kualitas substansi dalam dokumen dengan memberikan nilai/skor atas kualitas substansi yang ada dalam dokumen RPJMD. Pemberian skor didasarkan atas pendekatan skala (scalling system), dengan penetapan skor, untuk jawaban ada:

- a) Skor 1, Sangat Kurang
- b) Skor 2, Kurang
- c) Skor 3, Sedang
- d) Skor 4, Baik
- e) Skor 5, Sangat Baik

2) Penilaian

Perolehan skor atas keseluruhan pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor kumulatif dan dibandingkan dengan skor ideal

untuk mengetahui persentase pencapaiannya. Dari skor kumulatif yang diperoleh memberikan ranking indikasi prioritas pada penguatan komponen RPJMD. Dengan tingkatan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Kelengkapan dan Kualitas
Dokumen Perencanaan RPJMD

Persentase Penilaian	Kriteria Penilaian
81 – 100%	Sangat Memuaskan/Diterima seluruhnya
61 – 80%	Sangat Baik/Diterima secara substantial
41 – 61%	Baik/Kurang lebih dapat diterima
21 – 40%	Rata-rata/Diterima secara parsial
0 – 20%	Kurang/Tidak dapat diterima

B. Untuk penilaian terhadap Kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran secara umum, dengan cara:

1) Penentuan Skor

Dalam variabel penilaian ini terdapat 18 indikator pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Seluruh data dari indikator pertanyaan kemudian dikelompokkan dengan menggunakan teknik scoring, terdapat 2 (Dua) jawaban, untuk jawaban:

- a) Ya dengan skor 1 didasarkan atas wawancara dan penelusuran pada dokumen yang relevan (ada dokumen)
- b) Tidak dengan skor 0 didasarkan pada wawancara dan penelusuran pada dokumen yang kurang relevan (tidak ada dokumen)

2) Penilaian

Setiap indikator dijumlahkan untuk setiap hasil pada masing-masing sub variabel dan penilaian didasarkan atas presentase jumlah indikator

tercapai dibandingkan dengan nilai jumlah indicator masing-masing sub variabel. Jumlah indicator tercapai untuk setiap hasil pada masing-masing sub variabel menggambarkan sejauh mana tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang tepat dengan target anggaran yang layak dan terhubung dengan perencanaan daerah. Dengan menjumlahkan total semua jumlah indicator tercapai masing-masing sub variabel dan dibandingkan dengan total semua jumlah indicator keseluruhan, didapatkan nilai yang mencerminkan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah terkait proses perencanaan dan penganggaran yang berkinerja baik/berkinerja buruk. Dengan tingkatan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemda terkait
Proses Perencanaan dan Penganggaran

Persentase Penilaian	Kriteria Penilaian
81 – 100%	Sangat Memuaskan/Diterima seluruhnya
61 – 80%	Sangat Baik/Diterima secara substantial
41 – 61%	Baik/Kurang lebih dapat diterima
21 – 40%	Rata-rata/Diterima secara parsial
0 – 20%	Kurang/Tidak dapat diterima

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu Kota tertua di Pantai Barat Sumatera di Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah, pada awalnya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam, dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minang mengarah ke Pantai Timur melalui sungai-sungai besar. Namun Sejak Selat malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah malaka ditaklukkan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman, dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas.

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman. Belanda berhasil menguasai Padang pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 Belanda membuat Loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi dan daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan.

Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kota Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, Semen, Tambang Batubara (di Sawahlunto), serta Jalur Kereta Api. Namun yang menjadi hari Kota Padang adalah pada tanggal 7 Agustus 1669, karena pada tanggal tersebut terjadi penyerbuan besar-besaran terhadap Loji-loji Belanda di Kepalo Koto Batang Arau yang dilandasi semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara.

4.1.2 Kondisi Geografis

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah administrative sekitar 1.414,96 Km² terletak dipesisir pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi astronomis antara 00°05'05" BT - 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS - 01°08'35" LS. Berdasarkan PP Nomor 25 tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah administrasi Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Luas wilayah Kota Padang yang sebelumnya adalah 694,96 Km² daratan dan setelah ditambah luas perairan/laut 720 Km² yang merupakan hasil perluasan Kota Padang Tahun 1980, yaitu penambahan luas wilayah dengan 3 Kecamatan dan 13 Kelurahan.

Perluasan wilayah administrasi Kota Padang terjadi dengan menggabungkan 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu yang sebelumnya memiliki kedekatan social budaya dengan Kota Padang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Padang Luar Kota, yaitu Kecamatan Nanggalo Koto Tengah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Oleh karena luas wilayah dan alasan efektivitas pembangunan, ketiga kecamatan tersebut dijadikan 7 kecamatan. Pembentukan wilayah kecamatan baru mempertimbangkan struktur social budaya masyarakat dan kesatuan adat nagari agar tidak terpisahkan, maka wilayah administrasi kecamatan disesuaikan dengan kesatuan adat nagari yang sudah ada. Sedangkan tambahan 1 (Satu) kecamatan lagi adalah Kecamatan Padang Utara yaitu berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Tengah dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Barat Lama. 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan yakni:

- 1) Kecamatan Padang Barat dengan 10 Kelurahan
- 2) Kecamatan Padang Timur dengan 10 Kelurahan
- 3) Kecamatan Padang Utara dengan 7 Kelurahan
- 4) Kecamatan Padang Selatan dengan 12 Kelurahan
- 5) Kecamatan Nanggalo dengan 6 Kelurahan
- 6) Kecamatan Kuranji dengan 9 Kelurahan
- 7) Kecamatan Pauh dengan 9 Kelurahan
- 8) Kecamatan Lubuk Begalung dengan 15 Kelurahan
- 9) Kecamatan Lubuk Kilangan dengan 7 Kelurahan
- 10) Kecamatan Koto Tengah dengan 13 Kelurahan
- 11) Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan 6 Kelurahan

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah serta daerah aliran sungai yang terletak dipantai Barat Sumatera. Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan berupa bangunan dan perkarangan

9,05 persen atau 62,88 km² sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 7,52 persen atau 52,25 km².

Selain wilayah di daratan Pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 buah pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangor seluas 56,78 Ha, kemudian Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 Ha, pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha dan Pulau Pisang Gadang seluas 21,12 km² juga di Kecamatan Padang Selatan.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 Km² diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 384,88 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2007, suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 230 – 320 C pada siang hari dan pada malam hari adalah antara 220 - 280 C. Kelembabannya berkisar antara 70-84 persen.

Batas-batas wilayah Kota Padang sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatas dengan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
Sebelah Selatan	: Berbatas dengan Kecamatan Kambang Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelah Barat	: Berbatas dengan Samudera Hindia.
Sebelah Timur	: Berbatas dengan Kabupaten Solok.

Berikut ini tabel 4.1 yang menjelaskan secara singkat kondisi geografis Kota Padang.

Tabel 4.1
Kondisi Geografis Kota Padang

No.	Uraian	Data Kondisi Geografis
1.	Letak Wilayah	00°44'00" LS - 01°08'35" LS 00°05'05" BT - 100°34'09" BT
2.	Luas Wilayah Darat	694,96 Km ² (efektif = 205 Km ² /29 %)
3.	Luas Wilayah Laut	905,04 Km ²
4.	Panjang Pantai	68,13 Km (diluar pulau-pulau kecil)
5.	Iklim	23°C-32°C Siang 22°C-28°C Malam
6.	Jumlah Sungai	5 Besar dan 16 Kecil
7.	Jumlah Pulau	19 Buah pulau
8.	Curah Hujan	405,88 mm/bulan
9.	Keliling	165,35 Km
10.	Batas Wilayah	Utara = Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman Selatan = Kec. Kambang Kab. Pesisir Selatan Timur = Kab. Solok Barat = Samudera Hindia
11.	Jumlah Penduduk	Tahun 2004 = 784.740 jiwa Tahun 2005 = 801.344 jiwa Tahun 2006 = 819.740 jiwa Tahun 2007 = 838.190 jiwa Tahun 2008 = 855.709 jiwa

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang,
Padang Dalam Angka Tahun 2008*

4.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Padang dalam 5 Tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan yang signifikan antar kecamatan. Kepadatan jumlah penduduk begitu pesat disebabkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar daerah di propinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.2
Ibu Kota Kecamatan, Luas Wilayah, Banyaknya Kelurahan, Jumlah
Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Padang Tahun 2008

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Banyak Kelurahan	Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			Jumlah	Persen	
Bungus Teluk Kabung	100.78	6	24.116	2,82	240
Lubuk Kilangan	85.99	7	43.351	5,06	502
Lubuk Begalung	30.91	15	106.641	12,45	3.471
Padang Selatan	10.03	12	63.345	7,39	6.249
Padang Timur	8.15	10	87.174	10,17	10.524
Padang Barat	7.00	10	61.437	7,17	8.542
Padang Utara	8.08	7	76.326	8,91	9.347
Nanggalo	8.07	6	58.801	6,86	7.232
Kuranji	57.41	9	120.309	14,04	2.117
Pauh	146.29	9	53.669	6,26	370
Koto Tengah	232.25	13	161.466	18,84	685
Kota Padang	694.96	104	855.709	100,00	1.232

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, Hasil Susenas 2008,
Padang Dalam Angka Tahun 2008

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang
Pada Tahun 2004 – 2008 (dalam orang)

Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008
Bungus Teluk Kabung	22.717	23.197	23.400	23.592	24.135
Lubuk Kilangan	39.700	40.538	41.560	42.585	43.194
Lubuk Begalung	95.539	97.560	100.912	104.323	107.292
Padang Selatan	58.780	60.022	61.003	61.967	62.686
Padang Timur	81.427	83.151	84.231	85.279	85.774
Padang Barat	58.420	59.657	59.895	60.102	59.795
Padang Utara	71.256	72.766	73.730	74.667	75.527
Nanggalo	54.516	55.669	56.604	57.523	58.363
Kuranji	108.029	110.316	113.976	117.694	121.424
Pauh	49.163	50.204	51.354	52.502	54.256
Koto Tengah	145.193	148.264	153.075	157.956	163.926
Kota Padang	784.740	801.344	819.740	838.190	855.709

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang,
Padang Dalam Angka Tahun 2008

4.1.4 Kondisi Perekonomian Kota Padang

Perkembangan perekonomian Kota Padang sangat dipengaruhi oleh berbagi kebijakan pemerintah, baik dalam skala nasional, regional maupun daerah kabupaten/kota. Perkembangan Kota Padang sebagai pusat Pertumbuhan

Ekonomi, dima perkembangan keuangan dan investasi daerah di Sumatera Barat membawa pengaruh positif terhadap perekonomian Zona Padang.

Pada Tahun 2008 Perekonomian Kota Padang masih terlihat tetap mengalami peningkatan. Ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan PDRB pada Tahun 2008 sebesar 6,21 persen yaitu dari 10.165,76 milyar Rupiah pada Tahun 2007 menjadi 10.797,26 milyar Rupiah pada Tahun 2008 atau secara nominal naik sebesar 631,50 milyar Rupiah.

Tabel 4.4
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2006-2008

Lapangan Usaha	2006	2007	2008
1. Pertanian	5,46	5,63	5,77
2. Pertambangan	1,70	1,73	1,76
3. Industri Pengolahan	15,67	15,36	15,27
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2,29	2,26	2,16
5. Bangunan	4,67	4,57	4,53
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,58	20,77	20,91
7. Pengangkutan dan Komunikasi	24,83	24,47	24,10
8. Keuangan, Persew. & Js. Perush	8,22	8,45	8,63
9. Jasa-Jasa	16,57	16,75	16,89
PDRB	100,00	100,00	100,00

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2008,
Padang Dalam Angka Tahun 2008*

4.1.5 Kondisi Keuangan dan Pembangunan

Pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal, baik dalam membiayai anggaran belanja daerah, mengendalikan deficit anggaran maupun memelihara dan memantapkan ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian daerah serta berbagai langkah kebijakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum, pendapatan daerah dalam

beberapa tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2010 jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 5,01% (sebanyak Rp. 45,25 Milyar) dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2009, yaitu mencapai Rp. 948,76 Milyar sedangkan pada tahun anggaran 2009 sebanyak Rp. 903,51 Milyar. Dengan perkembangan kinerja pendapatan daerah tersebut, maka kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan belanja pada periode yang sama juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui perkiraan Pendapatan Daerah 2009-2010 dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2010
dan APBD Tahun 2009

No	Uraian	APBD-P 2009	Perkiraan 2010	Bertambah/ Berkurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	133.154.044.046.58	143.760.000.000.00	10.605.955.953.42	7,97
	a. Pajak Daerah	87.652.173.414.58	92.760.000.000.00	5.107.826.585.42	5,83
	b. Retribusi Daerah	27.751.399.234.00	30.000.000.000.00	2.248.600.766.00	8,10
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.718.294.398.00	6.000.000.000.00	1.281.705.602.00	27,16
	d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang disahkan	13.032.177.000.00	15.000.000.000.00	1.967.823.000.00	15,10
2	Dana Pertimbangan	729.513.178.160.00	765.000.000.000.00	35.486.821.840.00	4,90
	a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak	55.576.560.160.00	60.000.000.000.00	4.423.439.840.00	7,96
	b. Dana alokasi umum	628.472.618.000.000	655.000.000.000.00	26.527.382.000.00	4,22
	c. Dana alokasi khusus (DAK)	45.464.000.000.00	50.000.000.000.00	4.536.000.000.00	9,98
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	40.844.971.214.00	40.000.000.000.00	(844.971.214.00)	(2,07)
	a. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dari pemerintah	37.989.796.870.00	40.000.000.000.00	2.010.203.130.00	5,82
	b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	2.197.856.344.00	-	(2.197.856.344.00)	-
	c. Batuan keuangan dari propinsi atau pemerintah desa	657.318.000	-	(657.318.000.00)	-
	PENDAPATAN	903.512.193.420.58	948.760.000.000.00	45.247.806.579.42	5,01

Sumber : RKPD Kota Padang Tahun 2010

Meskipun dari sisi kemampuan fiskal daerah telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi secara umum struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Padang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan pendapatan daerah, melalui:

- 1) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah
- 2) Melakukan upaya pembinaan untuk mewujudkan iklim yang kondusif ditengah-tengah masyarakat
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota tentang kebijakan peningkatan penerimaan daerah tersebut meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatannya
- 4) Melakukan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dan warga kota tentang berbagai upaya kebijakan peningkatan penerimaan daerah.

4.2 Proses/Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Padang

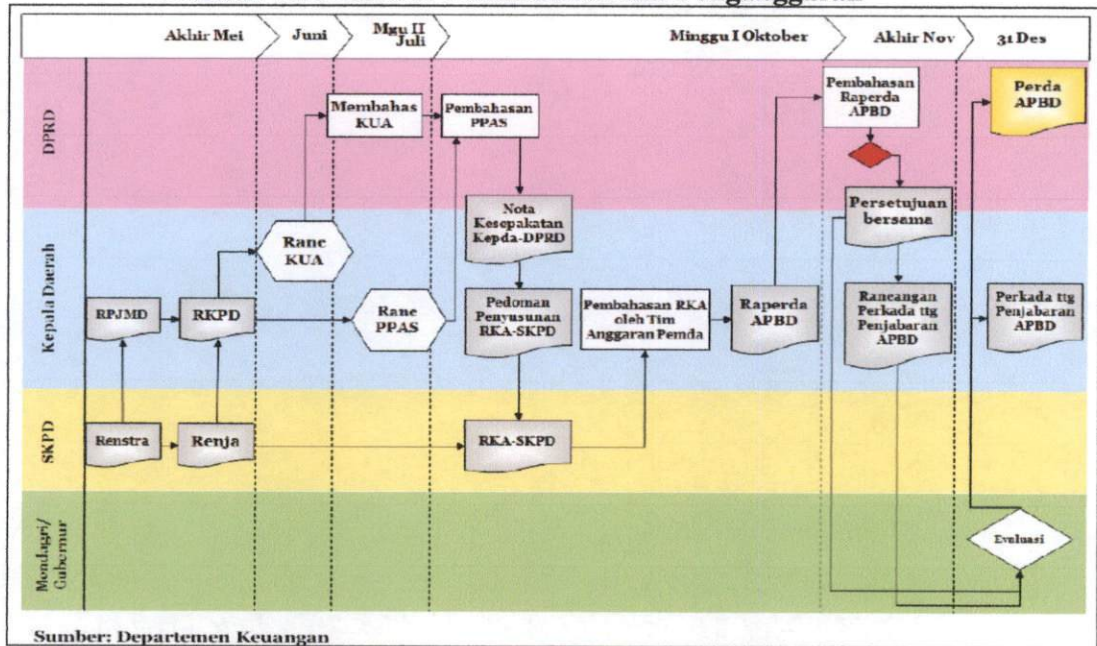
UU No. 17 Tahun 2003, dan UU No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan terdapat keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan system anggaran. PP No. 58 tahun 2005 menjelaskan bahwa system anggaran merupakan satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dan sistem anggaran. Perencanaan pembangunan yang diterapkan di Kota Padang Tahun 2010 adalah perpaduan antara mekanisme perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Sistem perencanaan yang diterapkan meliputi tahap-tahap:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terdiri dari:
 - a) Musrenbang Kelurahan
 - b) Musrenbang Kecamatan
 - c) Musrenbang Kota
- 2) Perencanaan dan Penyusunan Anggaran yang terdiri dari:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - c) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD
 - d) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
 - e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambaran tentang dokumen perencanaan dan penganggaran serta periodisasi waktu penetapannya dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Prosedur Perencanaan dan Penganggaran



1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan Musrenbang secara berjenjang mulai dari,

- Musrenbang Kelurahan,
- Musrenbang Kecamatan, dan diakhiri dengan
- Musrenbang Kota.

Hasil akhir Musrenbang berupa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan salah satu input untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2010. Rincian hasil Musrenbang SKPD Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Musrenbang Tahun 2010 untuk SKPD Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	PenanggungJawab	Pagu Indikasi (Rp.)
1	Peningkatan jasa pelayanan publik	Dinas Pendidikan	432,000,000.00
2	Penyediaan beasiswa	Dinas Pendidikan	448,000,000.00
3	Lomba olimpiade sains nasional	Dinas Pendidikan	165,038,600.00
4	Wajib belajar 9 tahun (SKB Lubeg)	Dinas Pendidikan	20,500,000.00
5	Pelaksanaan sekolah berstandar internasional	Dinas Pendidikan	400,000,000.00

Sumber : Rencana Kerja Pembangunan daerah Kota Padang Tahun 2010

Musrenbang adalah sinkronisasi rencana kegiatan yang dilakukan secara hirarki sesuai dengan jenjang Pemerintah dengan hasil akhir berupa rencana kegiatan yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun RAPBD. Aktivitas Musrenbang yang berisi serangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi, merumuskan, menilai dan memilih kegiatan.

Mekanisme penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2010. Dokumen KUA APBD disusun dengan mengacu kepada tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan mempertimbangkan masukan yang dihasilkan dari proses Musrenbang yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta masukan masyarakat dari proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh DPRD yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan hasil Musrenbang menghasilkan dokumen KUA.

Prioritas dan Plafon anggaran APBD Tahun Anggaran 2010, merupakan dokumen yang disusun berdasarkan KUA memuat informasi tentang program-program pembangunan. Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 hanya menginformasikan program yang akan dilaksanakan pada

tahun anggaran 2010 berdasarkan KUA. Program dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang, sedangkan KUA dirumuskan berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD dan Hasil Musrenbang.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014

A. Kerangka Pembangunan

Proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu proses yang sekuensial, terdapat hubungan antar waktu antar dokumen perencanaan serta seharusnya terjadi proses yang konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah diawali dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Secara peraturan, dokumen ini diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6(enam) bulan setelah kepala Daerah dilantik. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 ditetapkan pada Tanggal 15 Juli 2009.

RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Daerah hasil pemilihan secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2008. RPJMD merupakan titik tolak dalam pembangunan lima tahun kedepan sesuai dengan periode kepala daerah. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran, mengisyaratkan

pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, baik kegiatan antar program satu dan lainnya maupun kegiatan antar dalam 1(satu) SKPD program ataupun kegiatan dan program antar SKPD.

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Padang Tahun 2010 dilandasi dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009-2014, yaitu:

“ Menuju Metropolitan Padang yang Relegius, Aman dan Sejahtera ”

Karakter metropolitan yang religious dianggap sangat aspiratif dan akomodatif dengan adat dan budaya MinangKabau, Metropolitan adalah karakteristik kota yang maju dan mandiri ditunjukkan oleh jumlah dan ragam penduduknya, keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dalam satu sisitem kota, masyarakat yang cosmopolitan berlandaskan proses modernisasi yang berubah menuju kemajuan.

Aspek religious menggambarkan penerapan falsafaf adat basandi syara, syara basandi kitabullah dan syara mangato, adat memakai sehingga dapat diakomodasi oleh semua pihak, Religius berarti berlandaskan agama dan adat sehingga terbangun masyarakat berakhlak mulia dan pemimpin yang amanah dan menjadikannya komunitas dibawah kepemimpinan yang semakin tanggap dan peduli untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Aspek aman yang menggambarkan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan sesuai dengan aspirasi semua pihak sesuai dengan falsafah paga nagari yang menunjukkan kepedulian semua pihak untuk melanjutkan pembangunan, Aman berarti situasi dan kondisi yang menyenangkan sebagai prasyarat kelangsungan kehidupan dan berbagai kegiatan yang menyertainya.

Aspek kesejahteraan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai falsafah *baladun toyyibun wa rabbun ghafur*, Sejahtera berarti kemakmuran yang disertai keadilan dapat digambarkan oleh kehidupan social dan kegiatan ekonomi yang makin baik sehingga terjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan 3 (Tiga) misi pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam jangka waktu 5 tahun kedepan 2009-2014, adalah:

- a. Mewujudkan Kota Padang yang Religius**
- b. Mewujudkan Kota Padang yang Aman**
- c. Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan**

Tujuan pembangunan Pemerintah Kota Padang, yaitu:

1. Meningkatkan kecakapan aparatur dan kepemimpinan yang amanah dan berwibawa
2. Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih
3. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia
4. Mengembangkan daya tanggap dan sikap peduli kualitas pendidikan dan kesehatan
5. Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan
6. Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum
7. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan, ketertiban umum dan ketahanan social
8. Mengembangkan kemampuan dalam penanggulangan bencana dan dampaknya
9. Meningkatkan kerjasama antara lembaga dan daerah dalam pembangunan daerah
10. Mengembangkan koordinasi antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin
11. Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja
12. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan menuju kota metropolitan.

Sasaran pembangunan daerah, yakni:

1. Meningkatkan kecakapan aparatur dan proses pembinaan, pendidikan dan latihan
2. Berkembangnya etos kerja dan kepemimpinan amanah dan mekanisme evaluasi diri

3. Meningkatkan kelengkapan kerja dan berkembangnya teknologi informasi-komunikasi
4. Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan dan meningkatnya pelayanan umum
5. Meningkatnya pemahaman agama, adat dan budaya serta pengalaman akhlak mulia
6. Meningkatnya pola tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
7. Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan pelestarian lingkungan
8. Berkembangnya kawasan permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang
9. Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan social setempat
10. Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana dan meningkat partisipasinya
11. Meningkatnya kerjasama pembangunan antara lembaga dan daerah serta kinerjanya
12. Berkembangnya konsep peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin
13. Meningkatnya koohrdinasi pemberdayaan masyarakat miskin dan perbaikan kinerja
14. Berkembangnya investasi dan meningkat dampaknya terhadap perekonomian kota
15. Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja dan dampak social-ekonominya
16. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan dan dampaknya terhadap ekonomi local
17. Meningkatnya fungsi pusat pelayanan umum kawasan dan dampak social-ekonomi
18. Berkembangnya kerjasama pelaku pembangunan untuk mewujudkan metropolitan.

Strategi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi organisasi dan perbaikan budaya kerja
2. Reorganisasi dan desentralisasi kewenangan dan urusan
3. Sosialisasi dan komunikasi serta persuasi untuk berpartisipasi
4. Revitalisasi fungsi dan peran kelembagaan social dan budaya
5. Redistribusi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kawasan
6. Koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberdayaan komunitas miskin

Pembangunan Kota Padang diarahkan kepada lima pilar pembangunan sebagai rujukan bagi pengembangan program aksi yang didukung strategi pembangunan dan menjadi prioritas dalam jangka lima tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan citra lembaga pemerintahan
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
3. Pemerataan pengembangan kawasan dan penanggulangan bahaya dan bencana
4. Pengembangan ekonomi local dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran
5. Pengembangan kerjasama antar lembaga dan antar daerah menuju metropolitan

Kegiatan-kegiatan pembangunan lebih diprioritas kepada, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
3. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan
4. Sinkronisasi kebijakan dalam urusan pemerintahan untuk menghindari penyimpangan sehingga dapat diwujudkan fakta integritas
5. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi public
6. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum
7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mencapai target MDG
8. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi public
9. Pembenahan pasar tradisional dan modern untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
10. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi
11. Penetapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan
12. Pengembangan model perkotaan mandiri untuk percepatan menuju kota metropolitan
13. Pengembangan jalan lingkar luar dan jalan pantai untuk perbaikan akses pusat-pusat
14. Peningkatan akses dan intensitas interaksi untuk pemerataan pembangunan kawasan
15. Pembenahan system transportasi umum untuk peningkatan kenyamanan penggunaannya
16. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
17. Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah
18. Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin.

Agenda-agenda utama pembangunan serta prioritas program, yaitu:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Amanah
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya

3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kawasan, Prasarana dan Sarana
4. Meningkatkan Kerjasama Penanggulangan Bencana, Bahaya dan Dampaknya
5. Meningkatkan Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
6. Mewujudkan Ketangguhan dan Daya Saing Menuju Kota Metropolitan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 memberikan 3 (tiga) arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan citra lembaga pemerintahan
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan daerah
3. Peningkatan perekonomian kota dan kerjasama antar lembaga dan daerah dalam pembangunan.

B. Kerangka Pendanaan

1. Kebijakan Umum Anggaran

Sesuai dengan prinsip *good governance*, sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan umum anggaran adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong berjalannya pengelolaan keuangan daerah efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan keluarnya pedoman baru untuk pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007. Peraturan ini mengubah secara signifikan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang.

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Daerah Kota Padang, yakni:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah.
2. Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penetapan dan penyesuaian alokasi pagu dana perimbangan pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri Keuangan.
3. Sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah, seperti bagi hasil dari pajak propinsi, bantuan dari provinsi, hibah dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang dianggarkan pada lain-lain pendapatan yang sah.

Sejalan dengan perkembangan kota ke depan diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Diperkirakan selama periode 2009-2014 pendapatan akan tumbuh pertahunnya sebesar 4,3%.

Tabel 4.7
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2010-2014
(Dalam Rp. Juta)

URAIAN	Rencana 2009	Rencana 2010	Rencana 2011	Rencana 2012	Rencana 2013	Rencana 2014
PENDAPATAN DAERAH	903.512.19	948.760.00	999.280.00	1.076.450.00	1.156.750.00	1.243.000.00
Pendapatan Asli Daerah	133.154.05	143.760.00	155.280.00	167.450.00	180.750.00	198.000.00
1. Pajak daerah	87.652.17	92.760.00	98.750.00	104.450.00	110.000.00	119.000.00
2. Retribusi daerah	27.751.40	30.000.00	33.930.00	36.750.00	40.250.00	44.000.00
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan	4.718.29	6.000.00	7.600.00	9.750.00	12.000.00	15.000.00
4. Bagian laba usaha daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.032.18	15.000.00	15.000.00	16.500.00	18.500.00	20.000.00
Dana Perimbangan	729.513.18	765.000.00	800.000.00	862.000.00	924.000.00	985.000.00
1. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	55.576.56	60.000.00	65.000.00	70.000.00	75.000.00	80.000.00
2. Dana alokasi umum	628.472.62	655.000.00	680.000.00	730.000.00	780.000.00	830.000.00
3. Dana alokasi khusus	45.464.00	50.000.00	55.000.00	62.000.00	69.000.00	75.000.00
4. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dana perimbangan dari propinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain- lain Pendapatan yang Sah	40.844.97	40.000.00	44.000.00	47.000.000	52.000.00	60.000.00
1. Bantuan dana kontijensi/ penyeimbangan dari pemerintah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Hibah						
3. Dana Darurat						
4. DBH dari Propinsi & Pemda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	37.989.80	40.000.00	44.000.00	47.000	52.000	60.000.00
6. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

b. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Tujuan utama dari pengelolaan belanja daerah adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah. Arah pengelolaan belanja Pemerintah Kota Padang untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai untuk dua tahun kedepan diperkirakan 1% s/d 2% dan tiga tahun berikutnya sekitar 5% s/d & 7%. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya akan diupayakan

pemanfaatannya dalam aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, social dan budaya.

2. Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja langsung mulai tahun anggaran 2009 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektifitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Tahun anggaran 2010 diperkirakan hanya meningkat sebesar 6% s/d 7%.
3. Peningkatan pendapatan daerah tahun 2010-2014 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja langsung, terutama belanja modal untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi Kota. Tahun 2010 kenaikan sebesar 2% s/d 5%, Tahun 2013-2014 mengalami peningkatan 10% s/d 17%.

Tabel 4.8
Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014
(Dalam Rp. Juta)

URAIAN	Rencana 2009	Rencana 2010	Rencana 2011	Rencana 2012	Rencana 2013	Rencana 2014
BELANJA DAERAH	1.050.117.95	1.002.760.00	1.042.280.00	1.109.450.00	1.206.450.00	1.263.000.00
Belanja Tidak Langsung	728.222.96	720.000.00	739.000.00	783.000.00	832.000.00	881.000.00
1. Belanja pegawai						
2. Belanja bunga	630.862.94	640.000.00	655.000.00	700.000.00	750.000.00	800.000.00
3. Belanja subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Belanja bantuan sosial	36.825.90	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
6. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	14.211.50	13.000.00	12.000.00	11.000.00	10.000.00	9.000.00
	45.322.62	35.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
7. Belanja tak terduga	1.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
Belanja Langsung	321.894.99	282.760.00	303.280.00	326.450.00	374.750.00	382.000.00
1. Belanja pegawai	49.690.33	26.900.00	30.000.00	36.000.00	40.000.00	43.000.00
2. Belanja barang dan jasa	159.318.13	140.680.00	149.780.00	159.000.00	189.750.00	169.000.00
3. Belanja modal	112.886.53	115.000.00	123.500.00	131.450.00	145.000.00	170.000.00

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah bersumber antara lain:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Transfer dari dana cadangan
3. Penerimaan pinjaman dan obligasi
4. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan

Tabel 4.9
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014
(Dalam Milyar Rupiah)

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Pembiayaan Daerah						
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	157.24	60	50	40	30	20
2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	20	0
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
4. Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
5. Penerimaan kembali pemberian penerimaan	0	0	0	0	0	0
6. Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0
Jumlah penerimaan pembiayaan	157.24	60	50	40	50	20

Sedangkan Pengeluaran daerah antara lain:

1. Transfer ke dana cadangan
2. Penyertaan modal Pemda dalam BUMD
3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan
4. Pembayaran utang kepada pihak ketiga
5. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (Silpa)

Tabel 4.10
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014
(Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	Rencana 2009	Rencana 2010	Rencana 2011	Rencana 2012	Rencana 2013	Rencana 2014
Pendapatan daerah	903.512.19	948.760.00	999.280.00	1.076.450.00	1.156.750.00	1.243.000.00
Belanja daerah	1.050.117.95	1.002.760.00	1.042.280	1.109.450.00	1.206.750.00	1.263.000.00
Surplus/ defisit	(146.605.75)	(54.000.00)	(43.000.00)	(33.000.00)	(50.000.00)	(20.000.00)
Pembiayaan		54.000.00	43.000.00	33.000.00	50.000.00	20.000.00
Penerimaan pembiayaan	157.249.70	60.000.00	50.000.00	40.000.00	50.000.00	20.000.00
Pengeluaran pembiayaan	10.643.95	6.000.00	7.000.00	7.000.00	0.00	0.00
Surplus/ defisit	146.605.75	54.000.00	43.000.00	33.000.00	50.000.00	20.000.00
Jumlah Pendapatan	1.060.761.90	1.008.760.00	1.049.280.00	1.116.450.00	1.206.750.00	1.263.000.00
Jumlah Pengeluaran	1.060.761.90	1.008.760.00	1.049.280.00	1.116.450.00	1.206.750.00	1.263.000.00
Surplus/Defisit (pendapatan- pengurangan)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010

Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang dibuat Pemerintah Kota Padang selanjutnya adalah dokumen RKPD. Dokumen RKPD merupakan hasil sinkronisasi usulan kegiatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Dokumen ini berisi informasi tentang program, kegiatan beserta nilai anggaran indikatif yang akan diajukan dalam APBD.

RKPD Kota Padang adalah suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pembangunan Kota Padang untuk periode satu tahun dimulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun tersebut. RKPD Kota Padang merupakan penjabaran dan penyusunannya mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Padang Tahun 2009-2014 yang nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang nomor 19 Tahun 2009 dan ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2009. Berdasarkan PP No 8 Tahun 2008, RKPD Kota Padang

tahun 2010 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah (APBD) dan pendanaannya serta mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif maupun kebijakan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004, RKPD Kota Padang Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kebijakan pembangunan dan kerangka ekonomi makro serta pembiayaan pembangunan yang bersifat indikatif yang dijadikan dasar/pedoman untuk penyusunan Renja-SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta penyusunan RAPBD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

RKPD yang merujuk pada RPJMD menjadi satu dokumen perencanaan pemerintahan daerah untuk setiap tahun. Perencanaan tahunan ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahunan Pemerintahan Daerah dalam bentuk APBD. Dalam rangkaian penyusunan RKPD Kota Padang telah dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum SKPD Kota Padang serta Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Forum dan Musrenbang tersebut menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan penyesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Dengan adanya RKPD Kota Padang, prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Padang dalam RPJMD Tahun 2009-2014 diharapkan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Pembangunan

Terdapa 3(Tiga) arah kebijakan pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan citra lembaga pemerintahan
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan daerah
3. Peningkatan perekonomian kota dan kerjasama antar lembaga dan daerah dalam pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2010, merupakan kelanjutan kebijakan pembangunan tahun 2009 dan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Padang 2009-2014. Pemerintah Kota Padang menetapkan tahun 2010 sebagai Tahun awal aktualisasi Visi dan Misi Kota sesuai arah kebijakan RPJMD Tahun 2009-2014, maka tema pembangunan tahun 2010 adalah :

“Aktualisasi visi kota melalui peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan perekonomian kota serta peningkatan kerjasama antar lembaga dan daerah menuju kota metropolitan yang religius, aman dan sejahtera”

Prioritas pembangunan Kota Padang sebagian besar diarahkan kepada melanjutkan prioritas tahun 2009, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pemberdayaan pemerintahan bawahan serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Upaya pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan kesejahteraan social
3. Pembinaan kerukunan hidup beragama, peningkatan kualitas dan aktivitas keagamaan serta kebudayaan
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun serta peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan
5. Pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga serta kependudukan dan KB
6. Mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, investasi dan pembinaan tenaga kerja serta ketahanan pangan
7. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kota, penataan ruang, pemukiman dan perumahan, perhubungan dan transportasi kota, pariwisata, lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Sasaran pembangunan Kota Padang Tahun 2010, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di semua tingkat pemerintahan serta berjalan roda pemerintahan yang baik.
2. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan, khususnya kelompok masyarakat miskin.
3. Berbagai program khusus diupayakan dan terus ditingkatkan.
4. Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilaksanakan, pemantapan dan peningkatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
5. Peningkatan kecerdasan masyarakat dan kelembagaan social masyarakat dalam mendorong kepedulian masyarakat terhadap pembangunan perkotaan dalam bentuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan penataan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing melalui produk unggulan dan perluasan investasi daerah, terjaminnya stabilitas harga kebutuhan pokok.
7. Peningkatan fungsi kota dan terciptanya kehidupan yang layak dikota.

Pemerintah telah menetapkan bahwa tahun 2010 merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional. Bagi Kota Padang tahun 2010 merupakan tahapan memulihkan ekonomi menuju padang metropolitan tahun 2014. Walaupun kondisi perekonomian dunia belum pulih dari krisis ekonomi, namun dengan optimis pemerintah Kota Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sekitar 6,35 % per tahun sehingga produk domestic regional bruto(PDRB) Kota Padang diperkirakan pada tahun 2010 akan meningkat menjadi Rp. 11.481, 28 Milyar.

Asumsi makro pertumbuhan ekonomi kota padang adalah :

1. Kondisi perekonomian kota padang tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian tahun 2009
2. Pertimbangan krisis ekonomi masih berlanjut seperti tahun 2009
3. Pemerintahan tidak menaikkan harga BBM serta tidak ada kebijakan pemerintah yang drastic terhadap perekonomian (keadaan darurat)
4. Fluktuasi nilai tukar tidak tajam (≤ 100 point)
5. Kebijakan inflation targeting dipertahankan sekitar 6,2%
6. Tingkat bunga sekitar 6-7%

B. Kerangka Pendanaan

1. Arah Kebijakan Anggaran Tahun 2010

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Padang tahun 2010 mengacu kepada UU No.17 tahun 2003 dengan menindaklanjuti PP No.58 tahun 2005 tersebut. Oleh karena itu, kerangka pendanaan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2010 melakukan penyesuaian dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan petunjuk teknisnya, yaitu keterkaitan antara unsur perencanaan pembangunan dan anggaran dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-APBD dan PPAS-APBD Tahun 2010.

Pemerintah Kota Padang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, namun prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel masih perlu ditingkatkan. Karena itu, titik berat anggaran belanja daerah akan diarahkan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk, peningkatan program pendidikan, kesehatan dan pengembangan fasilitas umum dan khusus yang memadai.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun anggaran 2010 jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 5,01% sebanyak Rp. 45,25 milyar, tahun 2010 mencapai Rp. 948, 76 dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2009 sebanyak Rp. 903,51 Milyar.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Jumlah belanja daerah dalam tahun 2010 diperkirakan sebanyak Rp. 1.002,76 Milyar. Dibandingkan belanja daerah ini tahun anggaran 2009 sebanyak Rp. 1.050,12 Milyar terjadi penurunan sekitar 4,51 %.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam tahun anggaran 2010 Penerimaan pembiayaan keseluruhan adalah sekitar Rp. 60.000.000.000.00, besarnya penerimaan pembiayaan dalam tahun adalah mengingat kondisi daerah dan perkembangan di Kota Padang diman tidak semua penerimaan pembiayaan dapat dilaksanakan. Penerimaan tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya (SILPA Tahun 2009) sekitar Rp. 60,00 Milyar pada dasarnya sudah jauh lebih rendah dari anggaran tahun 2009, yaitu SILPA Tahun 2008, yaitu sebanyak Rp. 157, 25 Milyar. Pada tahun anggaran 2009 jumlah pengeluaran pembiayaan ini sebanyak Rp. 15.00 Milyar berarti lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yaitu sekitar Rp. 20.23 Milyar, penurunan pengeluaran pembiayaan terjadi karena beberapa jenis pengeluaran mengalami penurunan.

Pertimbangan alokasi anggaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010 ditetapkan berdasarkan kepada:

1. Program prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD), maka dalam RKPD Kota Padang Tahun 2010 yang ditekankan kepada 7(tujuh) prioritas pembangunan
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dengan merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama SKPD dalam bentuk tim kerja yang solid
3. Kebutuhan anggaran sesuai dengan Tingkat Keberhasilan Pelayanan (TKP) pada tahun 2010 dan Standar analisis Belanja (SAB), Standar Biaya(SB), serta fungsi pelayanan yang dilakukan dinas/instansi bersangkutan. Oleh karena belum adanya SAB, maka untuk penetapan

perkiraan pengalokasian anggaran bagi SKPD tahun 2009 dipedomani alokasi anggaran tahun lalu dengan kinerja yang dapat dicapainya.

4. Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan TKP yang diharapkan pada tahun 2010. Semakin besar anggaran tersedia semakin tinggi capaian TKP. Ada hubungan yang jelas antara target capaian kinerja pelayanan yang diharapkan dengan anggaran yang tersedia.
5. Penyediaan anggaran untuk pendampingan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN dan anggaran untuk pembiayaan kegiatan strategis berskala nasional yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah.
6. Penyediaan anggaran untuk kabupaten/kota dalam bentuk subsidi daerah bawahan yang diarahkan (DAK).

Berdasarkan kondisi daerah, tingkat capaian hasil pembangunan tahun 2006-2009 serta kerangka makro ekonomi Kota Padang tahun anggaran 2010, maka disusun perkiraan pagu anggaran pada Tahun anggaran 2010 masing-masing SKPD. Perkiraan pagu anggaran pada tahun anggaran 2010 sebanyak Rp. 1.002,760 Milyar dari jumlah tersebut 24.62% merupakan belanja tidak langsung dan 75.38% belanja langsung. Jumlah mata anggaran urusan wajib sebanyak Rp.948,89 Milyar dan urusan pilihan Rp.53,87 Milyar.

3. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD

Dokumen KUA disusun dengan mengacu kepada tujuan yang tercantum dalam RPJMD dan disesuaikan dengan RKPD. Dokumen ini memuat informasi tentang arah kebijakan masing-masing bidang kewenangan pemerintah daerah. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran APBD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang dibuat setelah disusunnya RKPD dokumen perencanaan tahunan pemerintahan daerah, penyusunannya mengacu kepada RKPD Kota Padang Tahun 2010 yang memuat kondisi umum dan pencapaian pembangunan, penentuan prioritas pembangunan serta kerangka ekonomi makro daerah,

sedangkan dalam dokumen KUA APBD Kota Padang Tahun 2010 berisikan petunjuk dan arah kebijakan anggaran yang harus ditindak lanjuti dalam penyusunan PPAS APBD Tahun 2010.

KUA APBD merupakan pokok-pokok kebijakan penganggaran (budget policy) secara konseptual yang dijadikan pedoman dan acuan bagi perencanaan operational anggaran daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam KUA APBD Tahun 2010 terlihat perkiraan dan target anggaran berdasarkan Pagu Indikatif (PI) terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun anggaran 2010. Rancangan KUA-APBD disusun oleh Kepala Daerah dan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku ketua Tim, Proses penyusunan KUA diawali dengan penyusunan teknis yang dilakukan TAPD.

Dalam berbagai pertimbangan dan asumsi dalam penyusunan APBD terlihat struktur APBD Kota Padang Tahun 2010 sebagai berikut:

- 1) Target Pendapatan Daerah mencapai Rp. 855,01 milyar, yang terdiri dari:
 1. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp. 80,58 milyar
 2. Dana Perimbangan sebanyak Rp. 718,63 milyar
 3. Lain-lain Pendapatn yang Syah sebanyak Rp. 55,80 milyar.
- 2) Target Belanja Daerah mencapai Rp. 1.030,01 milyar, terdiri dari:
 1. Belanja Tidak Langsung sebanyak Rp. 714,79 milyar
 2. Belanja langsung sebanyak Rp. 315,22 milyar.
- 3) Pembiayaan Daerah sebanyak Rp. 150, 00 milyar, terdiri dari:
 1. Penerimaan pembiayaan sebanyak Rp. 175,00 milyar
 2. Pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp. 0,00 milyar.

4. Prioritas dan Plaffon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Sebagaimana KUA APBD Tahun 2010 yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD, maka PPAS APBD Tahun 2010 juga mempunyai keterkaitan dengan KUA APBD Tahun 2010. Dokumen PPAS disusun berdasarkan KUA dan memuat informasi tentang program-rpgram, kegiatan pembangunan.

Proses penyusunan PPAS APBD Tahun 2010 merupakan bagian dari pada penyusunan sistem proses perencanaan anggaran untuk masa 1(satu) tahun. Oleh karena itu, penyusunan PPAS APBD tahun 2010 merupakan bagian penting dalam proses perencanaan anggaran sebagai dasar dan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2010. UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 serta PP No. 58 Tahun 2005 menyebutkan Penetapan KUA APBD dan PPAS APBD dibahas dan disepakati bersama antara pihak Pemerintah Daerah dan DPRD dan dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan bersama. Dokumen PPAS APBD Tahun 2010 memberikan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai SKPD. PPAS APBD digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2010.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dokumen APBD Kota Padang disusun berdasarkan dokumen KUA, PPAS, RKPD dan RPJMD. APBD secara umum terdiri dari Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

4.3.1 Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Analisis pertama dilakukan untuk mengetahui penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Padang yang bertujuan mendorong Pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen RPJMD sebagai dokumen penting perencanaan pembangunan daerah dalam mendorong partisipasi semua stakeholders dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penilaian terhadap proses perencanaan secara detail dinilai dengan 6 indikator yaitu, Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih, Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana, Pengembangan Keuangan Daerah, Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah, Proses Partisipasi Penyusunan Rencana, dan Kualitas Proses Pemikiran Rencana Strategis.

Adapun total pertanyaan secara keseluruhan untuk 6 indikator ini adalah 114 pertanyaan. Hasil pengolahan data untuk penilaian kualitas kelengkapan dokumen perencanaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.11
Kejelasan Visi, Misi, dan Agenda Kepala Daerah Terpilih

A	Indicator Pertanyaan	Skor Tercapai	Skor Ideal	% Skor
1	Sistematika daftar isi dokumen rencana yang runtun mengikuti proses dan alur pemikiran strategis	4	5	80%
2	Rumusan visi Kepala Daerah Terpilih yang smart (specific, measurable, achievable, realiable, timebound)	4	5	80%
3	Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah	4	5	80%
4	Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah	4	5	80%
	Nilai Skor A	16	20	80%

Dari tabel 4.11 diketahui penilaian atas kejelasan visi, misi dan Agenda Kepala Daerah Terpilih untuk menentukan kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD mendapatkan nilai 80%, dikategorikan baik karena dari 4 indikator pertanyaan dengan skor ideal 20, 16 skor tercapai.

Tabel 4.12
Kelengkapan Dan Keterpaduan Rencana

B	Indicator Pertanyaan	Skor Tercapai	Skor Ideal	% Skor
1	Profil Daerah	40	50	80%
2	Isu dan Permasalahan Strategi Daerah	48	60	80%
3	Perumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah	28	35	80%
4	Perumusan Program Pembangunan Daerah	20	25	80%
5	Kontribusi Program Daerah terhadap Penangan Isu Nasional	40	65	62%
6	Kejelasan Arah bagi Penyusunan Renstra SKPD	10	15	67%
	Nilai Skor B	186	250	74%

Dari tabel 4. 12 diketahui semua kelengkapan dan keterpaduan rencana yang dijadikan sebagai indikator penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD mencakup aspek profil daerah, isu dan permasalahan strategi daerah, perumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, perumusan program pembangunan daerah, kontribusi program daerah terhadap penanganan isu nasional serta kejelasan arah bagi penyusunan Renstra

SKPD mendapatkan nilai 74%, dikategorikan baik dengan jumlah pertanyaan 50, 186 skor tercapai didapat dari skor ideal 250.

Tabel 4.13
Pengembangan Keuangan Daerah

C	Indicator Pertanyaan	Skor Tercapai	Skor Ideal	% Skor
1	Informasi Keadaan Keuangan Daerah	12	15	80%
2	Kejelasan Rumusan Isu Strategi Keuangan Daerah	42	60	70%
3	Rumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah	28	35	80%
	Nilai Skor C	82	110	75%

Dari tabel 4.17 diketahui dari 3 (tiga) indikator pertanyaan untuk penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD yaitu pengembangan keuangan daerah meliputi informasi keadaan keuangan daerah, kejelasan rumusan isu strategi keuangan daerah dan rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan keuangan daerah diperoleh nilai 75%, dikategorikan baik karena diperoleh skor tercapai 82 dari 110 skor ideal dengan 22 pertanyaan.

Tabel 4.14
Isu Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

D	Indicator Pertanyaan	Skor Tercapai	Skor Ideal	% Skor
1	Rumusan Isu Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah	16	20	80%
2	Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah	33	45	73%
	Nilai Skor D	49	65	75%

Dari tabel 4.14 diketahui 2 (dua) indikator pertanyaan untuk penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD yaitu, rumusan isu strategi pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah mendapat nilai 75% dengan kategori baik. Dari 13 pertanyaan dengan skor ideal 65, skor tercapai 49.

Tabel 4.15
Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana

E	Indicator Pertanyaan	Skor Tercapai	Skor Ideal	% Skor
1	Tim Teknis Daerah dan kelompok kerja perencanaan yang dibentuk oleh daerah dengna melibatkan non government stakeholders	4	5	80%
2	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang penyusunan RPJMD	4	5	80%
3	Penjaringan aspirasi masyarakat tentang isu dan harapan masyarakat	4	5	80%
4	Keterlibatan DPRD dalam berbagai tahapan proses penyusunan RPJMD	4	5	80%
5	Konsultasi publik dalam perumusan visi, misi dan agenda pembangunan daerah	4	5	80%
6	Konsultasi publik dalam perumusan isu strategis, strategi, dan kebijakan pembangunan	4	5	80%
7	Konsultasi publik dalam perumusan prioritas program	4	5	80%
8	Konsultasi publik dalam perumusan perkiraan alokasi anggaran program	4	5	80%
9	Penyelenggaraan Musrenbang rancangan awal RPJMD	4	5	80%
10	Kesepakatan yang dirumuskan dalam Musrenbang RPJMD	4	5	80%
11	Review dankomentar dari DPRD	4	5	80%
12	Dokumentasi pokok-pokok pikiran dari DPRD untuk penyusunan RPJMD	4	5	80%
13	Dokumentasi pokok-pokok pikiran dari non government stakeholders (NGO,CBO, CSO) untuk penyusunan RPJMD	4	5	80%
Nilai Skor E		52	65	80%

Dari tabel 4.15 diketahui proses politisi dan partisipasi penyusunan rencana yang menjadi indicator pertanyaan untuk penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD diperoleh nilai 80%, dikategorikan baik dengan 13 pertanyaan pendukung skor tercapai 52 dari skor ideal 65.

Tabel 4.16
Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana

F	Indikator Pertanyaan	Skor Tercapai	Skor Ideal	% Skor
1	Kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah	4	5	80%
2	Rumusan isu dan permasalahan strategi pembangunan daerah	5	5	100%
3	Kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah	4	5	80%
4	Kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah	4	5	80%
5	Kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah	4	5	80%
6	Kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah	4	5	80%
7	Penterjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi dan anggota KHD terpilih dalam perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan	4	5	80%
8	Penterjemahan yang baik dan sistematis, tujuan, dan strategi dan kebijakan kedalam rumusan prioritas program pembangunan daerah	5	5	100%
9	Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah	5	5	100%
10	Kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fisik daerah	4	5	80%
11	Keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional	4	5	80%
12	Proses perencanaan partisipatif yang memadai dalam penyusunan RPJMD	4	5	80%
	Nilai Skor F	51	60	85%

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa kualitas proses pemikiran strategis rencana merupakan indikator terpenting dari keseluruhan proses penilaian dan evaluasi dokumen RPJMD mulai dari kejelasan visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih, kelengkapan dan keterpaduan rencana, pengembangan keuangan daerah, pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah, proses politis dan

partisipasi penyusunan rencana mendapat nilai skor paling tinggi diantara 5 indikator lainnya yaitu 85%, dikategorikan sangat baik. Dimana dari 12 indikator pertanyaan dengan skor ideal 60, indikator terakhir ini mendapat skor tercapai dengan total 51. Berikut ini disajikan ringkasan hasil penilaian untuk setiap variabel:

Tabel 4.17
Hasil Penilaian Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rangkuman Hasil Penilaian	Jumlah pertanyaan	Total Score Ideal	Total Score Tercapai	% Score Tercapai thdp Score Ideal	Indikator Prioritas Penguatan Komponen RP JMD
A. Kejelasan visi misi dan agenda KDH terpilih	4	20	16	80%	3
B. Kelengkapan dan keterpaduan program	50	250	186	74%	5
C. Pengembangan keuangan daerah	22	110	82	75%	4
D. Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah	13	65	49	75%	5
E. Proses Politis dan Partisipasi dan Penyusunan Rencana	13	65	52	80%	2
F. Kualitas proses pemikiran strategi rencana	12	60	51	85%	1
Jumlah Nilai Kumulatif	114	570	436	77%	

Dari hasil penilaian pada masing-masing variabel penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang, diperoleh rata-rata dengan hasil relative Baik bahkan ada yang relative Sangat Baik total keseluruhan nilai kumulatif dari hasil penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD 77%, itu artinya kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPJMD Kota Padang dapat dikatakan Baik karena telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RPJMD sehingga

untuk mencapai tujuan pembangunan sudah dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan keinginan masyarakat.

4.3.2 Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemerintah Daerah terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran

Analisis kedua dilakukan untuk mengetahui penilaian terhadap kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mencerminkan pencapaian yang diharapkan dari proses perencanaan dan penganggaran daerah dan untuk menilai sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai atau tidaknya proses perencanaan dan penganggaran yang berkinerja baik atau berkinerja buruk.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3, proses perencanaan dan penganggaran merupakan variabel dalam penelitian penilaian terhadap kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran daerah, dan terdapat 3 (Tiga) komponen sub variabel yaitu, tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun, target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis serta sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk.

Adapun total indikator pertanyaan dari 3 (Tiga) komponen sub variabel ini adalah 18 indikator pertanyaan. Hasil pengolahan data tentang penilaian terhadap kinerja Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran dapat disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.18
Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Multi-tahun

Indicator Pertanyaan	Hasil Empiris	Dokumen	Skor
1. RPJMD merupakan dokumen yang realistis serta berisi strategi, program&kegiatan yang terkait dengan sasaran	Ya	Tercantum	1
2. Program dan kegiatan dalam RPJMD merupakan dokumen yang dapat diukur secara kuantitatif	Ya	Tercantum	1
3. Kebijakan umum APBD (KUA) & PPAS mencakup indikator hasil yang dapat diukur	-	-	0
4. Dalam anggaran satuan kerja terdapat indikator-indikator hasil yang terukur dan merujuk pada strategi	-	-	0
5. KUA & PPAS di susun sebelum proses RKA di SKPD di mulai	Ya	Tercantum	1
6. Telah disusun analisis standar biaya	-	-	0
Total Skor			3
Skor Ideal			6
% Nilai rata-rata			50%

Dari tabel 4.18 memperlihatkan bahwa dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Padang merupakan dokumen yang dinilai realistis, dengan berisi strategi yang jelas, program-program dan kegiatan yang berdasarkan target dan terkait dengan sasaran. Menurut Jasrizal (2010), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Padang sasaran berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 adalah hasil yang diharapkan dari suatu program/keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan, idealnya dokumen RPJMD Kota Padang memiliki sasaran yang dapat dicapai melalui kegiatan dan program yang direncanakan/dibuat oleh masing-masing SKPD. Sasaran pembangunan daerah dalam kerangka penguatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan memiliki prioritas pembangunan salah satunya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mencapai target memiliki program pembangunan

yaitu program manajemen pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menjadi target/sasaran terlaksananya kerjasama kelembagaan dibidang pendidikan dan berperannya dewan pendidikan Kota Padang serta terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang optimal pada masyarakat miskin untuk meningkatkan derajat kesehatan, dengan indikator kinerja seluruh Sekolah Menengah negeri sudah menerapkan SIM pendidikan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin dari 78,8% pada 2008 menjadi 100% pada 2014 untuk lebih detailnya digambarkan pada Lampiran 3 yaitu matrik indikator kinerja RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 (menurut urusan).

Jasrizal (2010), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Padang menyatakan bahwa dalam dokumen RPJMD Kota Padang berisi program dan kegiatan yang diukur secara kuantitatif karena dokumen RPJMD Kota Padang memiliki Pagu Indikatif dan Target Indikatif yang menjadi sasaran pengukuran dalam periode lima tahun. Pagu indikatif dan target indikatif terdapat pada indikasi program dan pendanaan, matriks indikator kinerja RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dan matrik indikator pengukuran kinerja RPJMD Tahun 2009-2014 pada Lampiran 2.

Wawancara dengan responden Jasrizal (2010), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Padang juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki dokumen KUA dan PPAS dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD dengan Nomor 183.14/HUK-PDG.XI/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010, Nomor 183.15/HUK-PDG.XI/2009 tanggal 9

November 2009 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2010. Dokumen KUA APBD Kota Padang Tahun 2010 berisikan petunjuk dan arah kebijakan anggaran yang harus ditindak lanjuti dalam penyusunan PPAS APBD Tahun 2010. Dalam dokumen KUA APBD dan PPAS APBD Tahun 2010 terlihat perkiraan dan sasaran/target berdasarkan Pagu Indikatif (PI) terhadap program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun anggaran 2010 tetapi tidak mencakup indikator hasil yang dapat diukur karena pada dokumen PPAS tidak terdapat sasaran dan targetnya untuk setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD sesuai pedoman dalam Permendagri No.59 Tahun 2007.

Setelah ditetapkannya dokumen KUA dan PPAS, selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada awal Agustus. Pedoman tersebut berisi:

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Dokumen RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Menurut Anfadli Azhar (2010), Kepala Seksi Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Padang yang mempunyai tugas menetapkan perencanaan program dan melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, menyatakan bahwa RKA SKPD Dinas Pendidikan tidak memiliki indikator-indikator hasil yang terukur dan merujuk pada Renstra(Strategi). Karena Dinas Pendidikan tidak memiliki lagi dokumen RKA SKPD Pendidikan yang selalu berubah-ubah penambahan dan pengurangan rencana kerja anggarannya sehingga Dinas Pendidikan menuangkan semua Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Factor lain karena mengalami kebakaran pada Dinas Pendidikan sehingga dokumen-dokumen penting yang disimpanpun ikut terbakar. Untuk dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) memiliki indikator-indikator hasil yang terukur dan merujuk pada Renstra (Strategi).

Satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah adalah konsistensi waktu atau jadwal dari perencanaan dan penganggaran tersebut. Adanya jadwal yang meleset dapat mempengaruhi waktu penetapan APBD yang diharapkan berjalan pada awal tahun anggaran berikutnya. Jadwal pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dapat ditunjukan pada tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Jadwal Penyusunan APBD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

A. APBD

No	Uraian	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2	Penyampaian Rancangan KUS kepada Kepala Daerah	Awal bulan Juni	1 bulan
3	Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	3 minggu
4	KUA disepakati antara kepala Daerah dengan DPRD	Minggu I bulan Juli	3 minggu
5	Penyusunan Rancangan PPAS		1 minggu
6	Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD	Minggu II bulan Juli	3 minggu
7	PPAS disepakati antara Kepala daerah dengan DPRD	Akhir bulan Juli	3 minggu
8	Penetapan pedoman penyusunan RKA SKPD oleh Kepala Daerah	Awal bulan Agustus	1 minggu
9	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD	Minggu I Oktober	2 bulan
10	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD	Paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember)	2 bulan
11	Penetapan hasil evaluasi	15 hari kerja (pertengahan bulan Desember)	
12	Penetapan Perda tentang APBD dan Raper KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)	
13	Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	7 hari kerja	Akhir bulan Desember
14	Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi		7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/ Gubernur
15	Penghentian dan pencabutan pelaksanaan perda tentang APBD bersama DPRD	7 hari kerja	Awal bulan Januari
16	Penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan ditetapkan	
17	Penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	31 Desember	
18	Penyampaian Perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Mendagri/ Gubernur	7 hari kerja	

Sumber : PP. No. 58 Tahun 2005.

Menurut Jasrizal (2010), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Padang bahwa Dokumen KUA dan PPAS Kota Padang disusun sebelum proses RKA di SKPD dimulai. Rencana Kerja Anggaran SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dalam wawancara dengan responden, Menurut Anfadli Azhar (2010), Kepala Seksi Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Padang yang mempunyai tugas menetapkan perencanaan program dan melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, menyatakan bahwa RKA SKPD Dinas Pendidikan Kota Padang disusun pada akhir tahun oktober 2009 untuk RKA SKPD Tahun 2010 oleh Dinas Pendidikan, perkiraan tanggal penyusunan pada tanggal 10 hingga 15 oktober 2009. Begitu pula menurut Eflinda Siswati (2010), Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang juga menyatakan bahwa RKA SKPD Dinas Pendidikan disusun akhir oktober 2009 untuk RKA SKPD Tahun 2010, sedangkan pembahasan oleh DPRD pertengahan akhir November.

Standar biaya Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun biaya kegiatan dalam RKA SKPD Tahun Anggaran 2010. Dengan ditetapkan Peraturan Walikota Padang No.25.A tanggal 20 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Padang, Proses penganggaran yang akan menjadi baik jika adanya suatu Standar Biaya yang akan menentukan kualitas penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Pengelolaan anggaran sesuai Standar Biaya yang terukur dan tepat dilakukan untuk menghindari *mark-up* serta surplus anggaran yang tidak perlu. Pemerintah Kota

Padang telah menyusun Analisis Standar Biaya tetapi belum menyusun Standar Analisis Belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk mencapai target tertentu.

Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun yang menjadi sub variabel indikator pertama penilaian terhadap kinerja Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran dapat dikategorikan sedang/baik dan sebagian dapat diterima karena memenuhi 3 dari total 6 indikator pertanyaan dengan nilai rata-rata 50%.

Tabel 4.20
Target Anggaran yang layak dan Berdasarkan Proses Penyusunan Anggaran yang Realistis

Indicator Pertanyaan	Hasil Empiris	Dokumen	Skor
1. APBD disahkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender anggaran	Ya	Tercantum	1
2. Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%	-	-	0
3. Rata-rata defisit realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir antara 0 sampai 3%	-	-	0
4. Perubahan anggaran tahun berjalan dilakukan berdasarkan alasan yang jelas sesuai dengan peraturan yang di dukung oleh LRA semester I	Ya	Tercantum	1
5. Perbedaan antara APBD induk dan APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung kurang dari 10%	Ya	Tercantum	1
6. Renstra & Renja SKPD memuat proyeksi biaya dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya	Ya	Tercantum	1
Total Skor			4
Skor Ideal			6
% Nilai rata-rata			67%

Dari tabel 4.20 memperlihatkan proses penganggaran pada akhirnya terdapat pada dokumen APBD. APBD seharusnya menjadi alat kebijakan fiskal pemerintahan daerah untuk mempengaruhi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, pengelolaan perencanaan dan penganggaran daerah harus memiliki suatu target anggaran yang

layak. Target anggaran yang ditujukan yaitu peningkatan kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dokumen APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Elvira (2010), Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang menyatakan bahwa penetapan APBD untuk Tahun Anggaran 2010 disahkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender anggaran memang pada akhir 31 Desember yaitu pada tanggal 1 Desember 2009, tetapi maksimalnya penetapan APBD awal Kota Padang disetujui pada bulan Januari 2010 yaitu 29 Januari 2010. Proses penetapan target anggaran ini juga harus didasari pada proses penyusunan anggaran yang realistis. Proses perencanaan menentukan tingkat realistis atau tidaknya penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Belanja APBD juga harus memperhatikan sumber daya pemerintah yang terbatas. Selain itu, perumusan hasil yang ditargetkan juga harus memperhitungkan tingkat kemahalan yang terjadi di daerah serta pencapaian kinerja yang diinginkan. Kemampuan pemerintahan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berkinerja baik ditentukan dengan Penyusunan APBD yang tepat akan berimplikasi pada relative rendahnya realisasi APBD terhadap besaran yang dianggarkan. Untuk hal ini, kinerja proses

penyusunan APBD tersebut dapat tercermin pada realisasi belanja APBD dibandingkan dengan nilai APBD yang dianggarkan pada awal tahun anggaran. Penilaian pada realisasi belanja ini tidak terlepas dari dampak yang dirasakan masyarakat adalah pengeluaran dalam belanja APBD. Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri menggunakan perbedaan antara realisasi dan anggaran terhadap total anggaran pemerintahan daerah sebesar 10%. Belanja APBD memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun di sisi yang lain dapat berdampak inflatoir. Karenanya, belanja APBD yang berlebihan akan dapat meningkatkan jumlah defisit APBD jika tidak dapat diimbangi dengan pendapatan APBD.

Tabel 4.21
Total Anggaran Belanja APBD dan Realisasi Belanja APBD
Kota Padang Tahun 2007-2009

Tahun	Total Anggaran Belanja APBD	Total Realisasi Belanja APBD	Selisih	%
2007	836.939.825.375,79	739.653.254.457,30	(97.286.570.918,49)	88,38
2008	1.010.677.264.245,24	881.727.534.947,00	(128.949.729.298,24)	87,24
2009	1.050.192.704.013,14	996.418.374.351,00	(53.774.329.662,14)	94,88

Tabel 4.22
Total Anggaran Pendapatan APBD dan Realisasi Pendapatan APBD
Kota Padang Tahun 2007-2009

Tahun	Total Anggaran Pendapatan APBD	Total Realisasi Pendapatan APBD	Selisih	%
2007	781.198.433.241,00	812.262.484.866,62	31.064.051.625,62	103,98
2008	922.411.851.098,00	918.857.414.760,77	(3.554.436.337,23)	99,61
2009	903.506.052.893,00	957.275.976.979,10	53.769.924.066,10	105,95

Perbedaan antara pengeluaran dalam bentuk Belanja APBD dan Pendapatan APBD Kota Padang yang direncanakan dan yang terealisasi selama 3 Tahun terakhir melebihi 10% (persen).

Proses penyusunan APBD juga dikenal menjadi dua bagian yaitu APBD yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta APBD Perubahan yang

ditetapkan sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan. Perubahan anggaran APBD memang sering dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Begitu pula, Pemerintah Kota Padang Perubahan APBD 2010 dilakukan Menurut Elvira (2010), Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang menyatakan bahwa perubahan anggaran tahun berjalan dilakukan karena Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis biaya (belanja), dan keadaan darurat. Proses penyusunan APBD Perubahan yang baik seharusnya mempertimbangkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I dari tahun anggaran berjalan, Laporan Realisasi Anggaran semester I(satu) untuk tahun 2010 dilaporkan paling lambat tanggal 10 April 2010. APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Perda No.01 Tahun 2010 Tanggal 29 Januari 2010 dan Penjabaran APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota No.05 Tahun 2010 Tanggal 29 Januari 2010. Sedangkan Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda No.05 Tahun 2010 Tanggal 25 Oktober 2010.

Kemampuan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dapat terlihat dari perbedaan yang tidak terlalu jauh antara belanja dalam APBD dan APBD Perubahan. Proses penganggaran yang baik seharusnya menghasilkan selisih yang sedikit. Angka kurang dari 10% ini menjadi *cut off number* yang digunakan oleh Depdagri dan Bank dunia. Selisih perbedaan APBD induk dengan APBD perubahan Kota Padang tahun 2010 sebesar Rp. 2,462,518,181.00, kurang dari 10 % yaitu 0,48 sehingga proses penganggaran dapat dikategorikan baik karena menghasilkan selisih yang sedikit kurang dari 10%.

Tabel 4.23
Perbedaan APBD Induk dengan APBD Perubahan untuk
Kelompok Belanja Langsung Kota Padang Tahun 2009-2010

Tahun	APBD Murni/Induk	APBD Perubahan	Selisih	%
2009	329,243,119,940.00	328,510,799,768.00	(732,320,172.00)	(0,22)
2010	508,293,825,951.89	505,831,307,770.89	(2,462,518,181.00)	(0,48)

Penganggaran dalam APBD tentunya menggambarkan penganggaran yang dilakukan di tingkat SKPD. Proses penganggaran di SKPD terdapat pada dokumen perencanaan SKPD baik Renstra maupun Renja SKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat SKPD. Renstra SKPD ini seharusnya berpedoman pada RPJMD dan proses penyusunannya seiring dengan proses penyusunan Renstra SKPD. SKPD juga memiliki dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Dokumen perencanaan tahunan ini selain bersumber pada dokumen perencanaan lima tahun SKPD, juga merujuk pada RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan di tingkat pemerintahan daerah. Kedua dokumen ini seharusnya memuat pagu indikatif yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Rencana strategis berisi program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Setiap SKPD harus membuat target keluaran dan hasil dari program dan kegiatan yang direncanakannya. Selain itu, harus memperhatikan pagu indikatif SKPD yang merupakan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh SKPD. Renstra SKPD untuk Dinas Pendidikan memuat narasi sedangkan untuk Renja SKPDnya memuat pagu indikatif dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya.

Target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis merupakan sub variabel indikator kedua penilaian terhadap kinerja

Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran mendapatkan nilai yang paling baik, 4 dari 6 indikator pertanyaan yang terpenuhi. Dengan nilai rata-rata 67%, dikategorikan baik dan secara umum dapat diterima.

Tabel 4.24
Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang Komprehensif dalam
Proses Perencanaan dan Penganggaran telah Terbentuk

Indicator Pertanyaan	Hasil Empiris	Dokumen	Skor
1. Terdapat proses evaluasi atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA dan PPAS	Ya	Tercantum	1
2. Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah di akses oleh masyarakat	Ya	Tercantum	1
3. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD	Ya	Tercantum	1
4. Proses perencanaan anggaran mencakup komponen partisipatif	Ya	Tercantum	1
5. Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD	-	-	0
6. Peraturan daerah mengatur sistem pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran	-	-	0
Total Skor			4
Skor Ideal			6
% Nilai rata-rata			67%

Dari tabel 4.24 memperlihatkan bahwa mengenai sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan sub variabel indikator terakhir untuk penilaian terhadap kinerja SDM Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran mendapatkan nilai rata-rata 67% dengan kategori baik dan secara umum dapat diterima karena 4 dari 6 indikator pertanyaan yang terpenuhi.

Dalam penilaian kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah terkait juga dengan proses pemantauan dan evaluasi. Tahapan proses perencanaan dan penganggaran telah menunjukkan setelah adanya KUA dan PPAS, maka SKPD membuat RKA SKPD sesuai dengan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD.

Implikasinya, diperlukan juga evaluasi terhadap kinerja RKA SKPD terhadap KUA yang telah ditetapkan. Karena dalam KUA dan PPAS, terdapat sasaran dan target yang terdapat pada dokumen PPAS. Sehingga perlu diketahui pula apakah sasaran dan target ini juga dirujuk oleh SKPD. Menurut Anfadli Azhar (2010), Kepala Seksi Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Padang proses evaluasi dilakukan pada penyusunan dokumen RKA SKPD selama 2(dua) bulan atau 3(tiga) bulan bersama TAPD dan DPRD, dan terdapat kesesuaian dengan dokumen KUA dan PPAS pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD untuk Dinas Pendidikan.

Proses pemantauan dan evaluasi seharusnya dilaksanakan secara transparan dan mencakup komponen partisipatif. Untuk Transparansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Kota Padang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Daerah menginformasikan dengan melalui sejumlah cara seperti saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Website Pemerintahan Daerah, dan pengumuman di media massa lokal.

Proses perencanaan anggaran selain mengandung unsur transparan, juga seharusnya berisi komponen partisipatif, masyarakat juga dilibatkan dalam proses perencanaan penganggaran terkait proses pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, Website Pemerintahan Daerah, dan pengumuman di media massa lokal. Komponen partisipatif dalam proses penganggaran juga dapat terlihat pada pembahasan APBD di dalam sidang DPRD, masyarakat tidak memiliki akses terhadap sidang-sidang komisi DPRD mengenai APBD hanya dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Padang tidak memiliki

Peraturan daerah Kota Padang yang mengatur sistem pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran.

Kesimpulan dari 3 indikator yang melakukan penilaian terhadap kinerja SDM Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25
Hasil Penilaian terhadap Kinerja SDM Pemerintah Daerah terkait
Proses Perencanaan dan Penganggaran

Variabel	Sub variabel	Jumlah Indikator Tercapai	Jumlah Indikator Ideal	Rata - rata	Kriteria Penilaian
Perencanaan dan penganggaran	1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun	3	6	50%	Sedang
	2. Target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis	4	6	67%	Baik
	3. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk	4	6	67%	Baik
	Total rata-rata	11	18	61%	Baik

Dari Tabel 4.25 diatas, memperlihatkan bahwa dari 3 Sub variabel yang menentukan penilaian terhadap kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Padang, sub variabel indikator tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun memiliki persentase rendah dibandingkan dengan kedua sub variabel lainnya yaitu 50%, ini berarti tingkat penilaian terhadap kinerja Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran dari aspek tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun dapat dikategorikan berkinerja sedang/baik. Secara keseluruhan aparatur Pemerintah Daerah Kota Padang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran berkinerja sedang/baik terhadap aspek tersusunnya perencanaan

dan penganggaran multi-tahun, hal ini dapat dilihat dari total rata-rata yang diperoleh yaitu 50%.

Kemudian sub variabel indikator yang berada pada urutan kedua target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis mendapatkan persentase tinggi yaitu 67%, ini berarti tingkat penilaian terhadap kinerja SDM Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran dari aspek target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis dapat dikategorikan berkinerja baik. Secara keseluruhan aparatur Pemerintah Daerah Kota Padang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran berkinerja baik terhadap aspek target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis, hal ini dapat dilihat dari total rata-rata yang diperoleh yaitu 67%. Angka tersebut bisa dikategorikan secara umum dapat diterima.

Kemudian yang terakhir untuk sub variabel indikator mengenai sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk mendapatkan persentase sama dengan sub variabel indikator kedua yaitu 67%. ini berarti tingkat penilaian terhadap kinerja SDM Pemda Kota Padang terkait proses perencanaan dan penganggaran dari aspek sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk dapat dikategorikan berkinerja baik. Secara keseluruhan aparatur Pemerintah Daerah Kota Padang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran berkinerja baik terhadap aspek sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang

komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk, hal ini dapat dilihat dari total rata-rata yang diperoleh yaitu 67%.

Kesimpulan dari 3 sub variabel indikator yang menentukan penilaian terhadap kinerja SDM Pemda terkait proses perencanaan dan penganggaran dapat dikategorikan berkinerja Baik dan secara umum dapat diterima dengan persentase nilai 61%, semua total rata-rata persentase dari 3 sub variabel indikator dalam kisaran melebihi dari 50%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD dalam perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Kota Padang dapat dikatakan sudah terwujud dengan baik, ini tercermin dari tingkat penilaian responden sebesar 77%.
- 2) Poin 1 diatas menunjukkan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan telah menampung aspirasi masyarakat dan tertuang dalam dokumen RPJMD.
- 3) Berdasarkan Poin 1 dan 2 maka dapat dikatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (RPJMD) Kota Padang telah mencapai tujuan pembangunan dan dapat dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan keinginan masyarakat.
- 4) Kesimpulan poin 3 didukung oleh enam komponen penilaian, yang mendapatkan hasil persentase yang relative baik seperti berikut:
 - a) Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih yang sudah mencapai 80%
 - b) Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana sudah mencapai 74%
 - c) Pengembangan Keuangan Daerah yang sudah mencapai 75 %
 - d) Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah sudah mencapai 75%

- e) Proses Partisipasi Penyusunan Rencana sudah mencapai 80%
 - f) Kualitas Proses Pemikiran Rencana Strategis, sudah mencapai 85%
- 5) Penilaian terhadap kinerja SDM Pemerintah Daerah (PEMDA) yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat disimpulkan berkinerja baik dengan perolehan tingkat penilaian responden sebesar 61%.
- 6) Dengan demikian (berdasarkan poin 5 di atas) maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan aparatur Pemerintah Kota Padang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran relative sudah paham dengan konsep perencanaan dan penganggaran. Hanya 39% responden yang menyatakan belum begitu puas dengan kinerja SDM yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- 7) Berdasarkan angka pada poin 5 dan 6 tersebut maka dapat pula dikatakan bahwa kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran sudah cenderung melakukan keberpihakan kepada kepentingan publik atau orang banyak.
- 8) Adapun faktor yang mendukung poin 7 tersebut terlihat dari tiga komponen berikut:
- a) Telah tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun yaitu 50%.
 - b) Tercapainya target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan yang realistis yaitu 67%.
 - c) Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk 67%.

5.2 Implikasi dan Saran

- 1) Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap dua aspek yang saling terkait yaitu peningkatan kualitas proses dan langkah-langkah penyusunan Perencanaan di satu sisi dan Penganggaran disisi lain. Dua aspek ini harus betul-betul bersinergis, tidak mungkin perencanaan itu terimplimentasi dengan baik jika tidak didukung oleh kemampuan dalam ketersediaan anggaran. Justru itu disarankan agar dilakukan peningkatan keahlian dan keterampilan SDM yang cukup dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Padang. Hal ini sangat penting mengingat SDM yang berkeahlian dan berketerampilan dapat dipastikan akan menghasilkan program-program yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dengan demikian maka kebijakan dalam hal peningkatan kualitas dan keterampilan Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian segera dari Pemda Kota Padang.
- 2) Perencanaan dan Penganggaran yang efektif jika diimplementasikan secara konsisten. Artinya setiap lembaga sektoral mesti menjalankan program-programnya sesuai dengan apa yang sudah digarisbawahi didalam RPJMD. Karena persoalan yang ditemui ternyata masih terdapat SKPD yang belum konsisten dalam penerapan programnya sebagaimana yang diarahkan RPJMD. Justru itu disarankan agar pihak-pihak yang berwenang bisa menempatkan orang yang benar-benar berkompeten dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran. Disamping disarankan juga agar penempatannya disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2008. *Padang dalam Angka 2008*.
Padang: BPS Kota Padang dan Bappeda Kota Padang.
- Bank Dunia, 2006. *Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh dalam Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah di Aceh*.
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-188/Kep/Bangda/2007
Tentang *Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)*.
- Faisal, Sanapiah, 2005. *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Keban, Yeremis T, 2001. *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten/Kota*, Workshop Pejabat Legislatif dan Eksekutif Daerah Kab/Kota, MAP UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, Dr. MBA., AK., 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Oktora, Ceria, 2004. *Penerapan Sistem Anggaran Kinerja pada Pemerintah Kota Solok*.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Studi Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1999. *Laporan Interim : Pengembangan Model Standar Analisa Belanja Anggaran Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.

- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 183.14/HUK-PDG.XI/2009 *Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010.*
- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 183.15/HUK-PDG.XI/2009 *Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2010.*
- Pemerintah Kota Padang, 2008. *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang.
- Pemerintah Kota Padang, 2009. *Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009-2014.*
- Pemerintah Kota Padang, 2006. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2006-2010.*
- Pemerintah Kota Padang, 2009. *Peraturan Walikota Padang No. 19 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2010.*
- Pemerintah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang No. 13 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008.*
- Pemerintah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang No. 14 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008.*

- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2009
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan WaliKota Padang No. 24.A Tahun 2009
Tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2010
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang No. 05 Tahun 2010
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010.

LAMPIRAN

MODUL WAWANCARA

**DAFTAR PERTANYAAN INI DIISI OLEH PENELITI PADA SAAT
WAWANCARA DENGAN INFORMAN**

Petunjuk wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai pendapat informan yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi “ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA PADANG)”.

IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA	: JASRIZAL
2. UMUR	: 48 TAHUN
3. JENIS KELAMIN	: LAKI - LAKI
4. PENDIDIKAN TERAKHIR	: S.2
5. PANGKAT (Gol / Ruang)	: III/d
6. JABATAN	: KASUBAG PROGRAM BAPPEDA
7. INSTANSI DINAS/BADAN	: BAPPEDA
8. LAMA BEKERJA	: 14 TAHUN



KERTAS KERJA SKORING

PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN RPJMD

- 1) Beritanda “ pada kolom yang sesuai untuk masing-masing pernyataan dibawah ini.
- 2) Berilah skor untuk kualitas masing-masing pernyataan yang dinilai “ada” dalam dokumen.

Kurang		Baik		
1	2	3	4	5

A. Kejelasan Visi, Misi, dan Agenda Kepala Daerah Terpilih

A	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
1	Sistematika daftar isi dokumen rencana yang runtun mengikuti proses dan alur pemikiran strategis	✓		4	
2	Rumusan visi Kepala Daerah Terpilih yang smart (specific, measurable, achievable, realiable, timebound)	✓		4	
3	Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah	✓		4	
4	Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah	✓		4	
Jumlah Skor Komponen A				16	

B. Kelengkapan Dan Keterpaduan Rencana

1. Profil Daerah

B.1	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
1	Profil pelayanan umum	✓	4		
2	Profil ketertiban dan ketentraman dan keamanan	✓	4		
3	Profil ekonomi	✓	4		
4	Profil lingkungan hidupdan penataan ruang daerah	✓	4		
5	Profil perumahan dan fasilitas umum	✓	4		
6	Profil kesehatan	✓	4		
7	Profil pendidikan	✓	4		
8	Profil pariwisata dan budaya	✓	4		
9	Profil perlindungan sosial kependudukan	✓	4		
10	Profil perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah	✓	4		
Jumlah Skor B.1				40	

2. Isu dan Permasalahan Strategis Daerah

B.2	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
11	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis pelayanan umum	✓		4	
12	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis keterlibatan dan ketentraman dan keamanan	✓		4	
13	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis ekonomi	✓		4	
14	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis lingkungan hidup dan penataan ruang daerah	✓		4	
15	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis perumahan dan fasilitas umum	✓		4	

16	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis kesehatan	✓		4	
17	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis pendidikan	✓		4	
18	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis pariwisata dan budaya	✓		4	
19	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis perlindungan sosial kependudukan	✓		4	
20	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis dalam aspek penataan urusan pemerintah	✓		4	
21	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis dalam aspek pelayanan public	✓		4	
22	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis dalam aspek pengembangan demokratisasi	✓		4	
Jumlah Skor B.2				48	

3. Perumusan Tujuan, Strategis, Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan

B.3	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
23	Penyajian tujuan, strategis dan kebijakan RPJP Daerah/Kota	✓		4	
24	Penyajian tujuan, strategis dan kebijakan RPJM Daerah/Kota	✓		4	
25	Penyajian tujuan, strategis dan kebijakan RTRW Daerah/Kota	✓		4	
26	Rumusan tujuan pembangunan daerah lima tahun ke depan yang SMART	✓		4	
27	Rumusan yang jelas tentang strategi pembangunan daerah	✓		4	
28	Rumusan yang jelas tentang kebijakan umum pembangunan daerah	✓		4	
29	Rumusan yang jelas tentang prioritas pembangunan daerah	✓		4	
Jumlah Skor B.3				28	

4. Perumusan Program Pembangunan Daerah

B.4	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
30	Kejelasan tema dan prioritas program pembangunan daerah	✓		4	
31	Kejelasan judul dan deskripsi program	✓		4	
32	Kesesuaian kerangka dan pengorganisasian program dengan klasifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah (sesuai PERMENDAGRI 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah)	✓		4	
33	Tolak ukur dan target kinerja capaian program dalam lima tahun kedepan	✓		4	
34	Kesesuaian capaian program dengan capaian standar pelayanan minimal (SPM) Nasional	✓		4	
Jumlah Skor B.4				20	

5. Kontribusi Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional

B.5	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
35	Program-program yang berkontribusi pada penanganan permasalahan penuntasan kemiskinan	✓		4	
36	Program-program yang berkontribusi pada penanganan permasalahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (isu ilegal logging, illegal sand mining, kerusakan hutan lindung dan masalah kerusakan lingkungan tersebut dsb)	✓		4	
37	Program-program yang berkontribusi pada permasalahan penguatan peran	✓		3	

	perempuan dalam pembangunan				
38	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu (efisien organisasi perangkat daerah	✓	4		
39	Ada program yang berkontribusi pada penangan isu efisiensi pengelolaan keuangan daerah	✓	4		
40	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu pengembangan kawasan perbatasan	✓	2		
41	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu penanggulangan bahaya narkoba	✓	2		
42	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu penurunan ekonomi biaya tinggi	✓	3		
43	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu pemberantasan korupsi, kolusi dan mepotisme	✓	3		
44	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu gangguan keamanan dan ketertiban	✓	3		
45	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu penurunan hambatan perdagangan antar daerah	✓	3		
46	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu keadilan dan kesetaraan gender	✓	3		
47	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu kesejahteraan dan perlindungan anak	✓	2		
	Jumlah Skor B.5		40		

6. Kejelasan Arahkan bagi Penyusunan Renstra SKPD

B.6	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
48	Kejelasan program bersifat lintas SKPD	✓		4	
49	Kejelasan program bersifat lintas kewilayahan	✓		2	
50	Kejelasan pembagian peranan dan tanggung jawab SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran program RPJMD	✓		4	
	Jumlah Skor B.6			10	
	Jumlah Skor Komponen B			186	

C. Pengembangan Keuangan Daerah

1. Informasi Keadaan Keuangan Daerah

C.1	Pertanyaan	Ada	Tidak ada	Skor	Ket
1	Gambaran kondisi dan situasi keuangan daerah 5 tahun lalu	✓		4	
2	Gambaran umum dan kecendrungan mengenai penerimaan daerah dari berbagai sumber pendanaan	✓		4	
3	Gambaran umum dan kecendrungan mengenai belanja daerah menurut klasifikasi belanja	✓		4	
	Jumlah Skor C.1			12	

2. Kejelasan Rumusan Isu Strategis Keuangan Daerah

C.2	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
4	DAU	✓		3	
5	DAK	✓		3	
6	Dana dekonsentrasi	✓		3	
7	Pinjaman Daerah	✓		3	
8	Dana darurat	✓		3	
9	Pendapatan Asli Daerah	✓		4	
10	Aturan Hukum Keuangan daerah	✓		4	
11	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	✓		4	
12	Pengaturan manajemen aset daerah	✓		4	
13	Sistem informasi keuangan daerah	✓		4	
14	Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	✓		4	
15	Pengembangan ekonomi lokal	✓		3	
Jumlah Skor C.2				42	

3. Rumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Keuangan daerah

C.3	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
16	Rumusan dan arah kebijakan kerangka fiskal daerah	✓		4	
17	Proyeksi fiskal daerah	✓		4	
18	Target fiskal daerah	✓		4	
19	Analisa celah fiskal	✓		4	
20	Gambaran kerangka pendanaan jangka menengah	✓		4	
21	Rencana tindak prioritas pengelolaan keuangan daerah 5 tahun kedepan	✓		4	
22	Perkiraan alokasi anggaran untuk masing-masing program sesuai target kinerja capaian program	✓		4	
Jumlah skor C.3				28	
Jumlah skor komponen C				82	

D. Isu Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

1. Rumusan Isu Strategis Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

D.1	Pertanyaan	Ada	Tidak ada	skor	ket
1	Rumusan isu strategi kelembagaan daerah	✓		4	
2	Rumusan isu strategi pengembangan peraturan daerah	✓		4	
3	Rumusan isu strategi personalia daerah	✓		4	
4	Rumusan isu strategi BUMD	✓		4	
Jumlah Skor D.1				16	

2. Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

D.2	Pertanyaan	Ada	Tidak ada	skor	ket
5	Rencana pengembangan kelembagaan daerah untuk mengimplementasikan RPJMD	✓		4	
6	Kejelasan Lembaga Penanggung jawab untuk masing-masing program	✓		3	

7	Rencana pengembangan peraturan daerah untuk menunjang implementasi RPJMD (Prolegda)	✓		4	
8	Rencana kerjasama antar daerah	✓		3	
9	Rencana reformasi kelembagaan daerah (seperti) pembentukan TIM SATU ATAP, perbaikan iklim investasi di daerah, perbaikan pelayanan publik, komisi penanggulangan kemiskinan daerah dsb)	✓		3	
10	Rencana kerjasama dengan donor, lembaga, keuangan	✓		4	
11	Rencana pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan swasta	✓		4	
12	Rencana pengembangan BUMD	✓		4	
13	Rencana kerjasama dengan perguruan tinggi setempat	✓		4	
	Jumlah skor D.2	✓		33	
	Jumlah Skor Komponen D			49	

E. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana

E	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
1	Tim Teknis Daerah dan kelompok kerja perencanaan yang dibentuk oleh daerah dengan melibatkan non government stakeholders	✓		4	
2	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang penyusunan RPJMD	✓		4	
3	Penjaringan aspirasi masyarakat tentang isu dan harapan masyarakat	✓		4	
4	Keterlibatan DPRD dalam berbagai tahapan proses penyusunan RPJMD	✓		4	
5	Konsultasi publik dalam perumusan visi, misi dan agenda pembangunan daerah	✓		4	
6	Konsultasi publik dalam perumusan isu strategis, strategi, dan kebijakan pembangunan	✓		4	
7	Konsultasi publik dalam perumusan prioritas program	✓		4	
8	Konsultasi publik dalam perumusan perkiraan alokasi anggaran program	✓		4	
9	Penyelenggaraan Musrenbang rancangan awal RPJMD	✓		4	
10	Kesepakatan yang dirumuskan dalam Musrenbang RPJMD	✓		4	
11	Review dan komentar dari DPRD	✓		4	
12	Dokumentasi pokok-pokok pikiran dari DPRD untuk penyusunan RPJMD	✓		4	
13	Dokumentasi pokok-pokok pikiran dari non government stakeholders (NGO, CBO, CSO) untuk penyusunan RPJMD	✓		4	
	Jumlah Skor Komponen E			52	

F. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana

F	Pertanyaan	ada	Tidak ada	Skor	Ket
1	Kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah	✓		4	
2	Rumusan isu dan permasalahan strategi pembangunan daerah	✓		5	
3	Kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah	✓		4	
4	Kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah	✓		4	
5	Kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah	✓		4	

6	Kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah	✓		4	
7	Penterjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi dan anggota KHD terpilih dalam perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan	✓		4	
8	Penterjemahan yang baik dan sistematis, tujuan, dan strategi dan kebijakan kedalam rumusan prioritas program pembangunan daerah	✓		5	
9	Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah	✓		5	
10	Kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fisik daerah	✓		4	
11	Keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional	✓		4	
12	Proses perencanaan partisipatif yang memadai dalam penyusunan RPJMD	✓		4	
Jumlah Skor Komponen F				51	

Tabel 1: Hasil Penilaian

Rangkuman Hasil penilaian	Jumlah pertanyaan	Total Score Ideal	Total score Tercapai	% score tercapai thdp score ideal	Indikator prioritas penguatan komponen RP JMD
		a	b	$c = 100 \times b/a$	
. Kejelasan visi misi dan agenda KHD terpilih	4	20	16	80 %	3
. Kelengkapan dan keterpaduan program	50	250	186	74 %	5
. Pengembangan keuangan daerah	22	110	82	75 %	4
. Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah	13	65	49	75 %	5
. Proses Politis dan Partisipasi dan Penyusunan Rencana	13	65	52	80 %	2
. Kualitas proses pemikiran strategi rencana	12	60	51	85 %	1
JUMLAH NILAI KOMULATIF	114	570	436	77 %	

LAMPIRAN II : IINDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN

URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
13.1. Urusan Wajib		290,446,426,570.00	250,666,000,000.00	270,586,000,000.00	288,075,000,000.00	334,080,000,000.00	339,130,000,000.00
13.1.1. Urusan Pendidikan		19,727,211,000.00	18,023,957,000.00	23,200,000,000.00	23,200,000,000.00	25,000,000,000.00	27,000,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain diarahkan untuk :							
1 Menerapkan kaidah <i>good governance</i> pada penyelenggaraan urusan Pendidikan.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,725,821,000.00	3,725,821,000.00	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	3,850,000,000.00	3,900,000,000.00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pendidikan.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228,050,000.00	228,050,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	420,000,000.00
3 Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,680,000,000.00	1,710,000,000.00
4 Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	150,000,000.00
5 Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	6,757,404,000.00	6,757,404,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,900,000,000.00	8,500,000,000.00
6 Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa Inggris secara aktif	Program Pendidikan Menengah	2,322,876,000.00	2,322,876,000.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	3,700,000,000.00	4,150,000,000.00
7 Meminimalkan angka <i>drop-out</i> pendidikan dasar dan menengah.	Program Pendidikan Non Formal	470,000,000.00	470,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	780,000,000.00	870,000,000.00
8 Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4,203,254,000.00	2,500,000,000.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,600,000,000.00
9 Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	394,806,000.00	394,806,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00
10 Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota.							
11 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pendidikan							
13.1.2. Urusan Kesehatan		24,011,364,950.00	23,445,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	26,000,000,000.00	26,500,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Kesehatan antara lain diarahkan untuk :							
1 Menerapkan kaidah <i>good governance</i> pada penyelenggaraan urusan Kesehatan.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,506,805,900.00	3,515,000,000.00	3,515,000,000.00	3,515,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,600,325,000.00	1,645,000,000.00	1,645,000,000.00	1,645,000,000.00	1,685,000,000.00	1,690,000,000.00
3 Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	193,165,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00	225,000,000.00	230,000,000.00
4 Meningkatkan kinerja dan sistem <i>surveillance</i> , respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD, TBC, HIV/AIDS, Hepatitis dan Diare	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	120,000,000
5 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	69,933,500	72,000,000	72,000,000	72,000,000	75,000,000	75,000,000
6 Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di lingkungan permukiman, utamanya pada pemukiman kumuh.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	815,000,000	865,000,000	865,000,000	865,000,000	895,000,000	905,000,000
7 Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	354,825,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	425,000,000	445,000,000
8 Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	150,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	220,000,000	220,000,000
9 Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	234,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	300,000,000	318,000,000
10 Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (<i>safety</i>) pelayanan kesehatan.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	264,018,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	425,000,000
11 Mewujudkan sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPK) termasuk pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin.	Program Pengembangan lingkungan Sehat	235,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	300,000,000	325,000,000
12 Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan.	Program Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular	945,849,200	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,250,000,000	1,300,000,000
13 Melaksanakan pendelegasian upaya kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	75,066,200	200,000,000	200,000,000	200,000,000	210,000,000	270,000,000
14 Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8,619,960,000	8,800,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000	8,900,000,000

LAMPIRAN III: MATRIK INDIKATOR KINERJA RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2014 KOTA PADANG (MENURUT URUSAN)

NO.	URUSAN DAN PROGRAM	TARGET/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	
	URUSAN WAJIB			
1	PENDIDIKAN			SETDA, DINAS PENDIDIKAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kelengkapan persuratan berupa perangko, meterai dan benda pos lainnya	Meningkatnya Pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur perencanaan	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya staf yang disiplin dan amanah dalam pelaksanaan tugas	Meningkatnya disiplin aparatur perencanaan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya SDM yang berpengetahuan sesuai dengan tupoksi	Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya pembangunan : a. Unit sekolah baru SD/ SMP b. Penambahan ruang kelas baru SD/ SMP serta Peningkatan mutu kelulusan SD/ SMP	- APK SD : 110 % - APM SD : 100 % - APK SMP/ MTs : 100 % - APM SMP / MTs : 95 % Persentase angka kelulusan - SD : 100 % - SMP : 100 %	
	Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya pembangunan : a. pembangunan unit sekolah baru SMA / SMK b. Penambahan ruang kelas baru SMA / SMK serta Peningkatan lulusan SMA / SMK	- Tertampungnya lulusan SMP / MTs di SMA dan SMK dengan : APK SMA / SMK = 85 %, APM SMA / SMK = 60 % - Rasio Jumlah Rombongan Belajar / Jumlah Ruang Kelas = 1:1 Rasio Murid perkelas : 1 Kelas SSN = 36 siswa 1 Kelas SBI = 24 Siswa	
	Program Pendidikan Non Formal	- Peningkatan Jumlah Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) - Penyelenggaraan program kecakapan hidup (Life Skill) - Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional - Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional	Terlayani warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya peningkatan : - Kualifikasi Kompetensi dan sertifikasi guru - Kualitas Proses Pembelajaran - Kompetensi tenaga kependidikan	- Seluruh guru sekolah menengah sudah S.1 50% guru sudah lulus sertifikasi - Guru MIPA pada SKL SBI Lancar berbahasa Inggris	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Penyediaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan serta terwujudnya peningkatan kinerja kepala sekolah	- Seluruh Sekolah Menengah Negeri sudah menerapkan SIM Pendidikan	
2	KESEHATAN			Dinas Kesehatan, RSUD, Setda
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tersedianya kelengkapan persuratan berupa perangko, meterai dan benda pos lainnya	Meningkatnya Pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur perencanaan	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya staf yang disiplin dan amanah dalam pelaksanaan tugas	Meningkatnya disiplin aparatur perencanaan	

LAMPIRAN IV: MATRIK INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA RPJMD TAHUN 2009 2014

NO.	URAIAN	Satuan	TARGET INDIKATOR PADA RPJMD						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	INDIKATOR MAKRO								
1	Indek Pembangunan Manusia		76,85	77,2	77,6	78,1	78,6	79,2	80,1
2	Ekonomi								
	➤ Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21	6,27	6,35	6,4	6,5	6,8	7
	➤ Meningkatnya PDRB per kapita (harga berlaku)	Rp	23,407,000.00	24,874,618.90	26,454,157.20	28,147,223.28	29,976,792.77	32,015,214.68	34,256,279.71
	➤ Meningkatnya PDRB per kapita (harga konstan)	Rp	12,601,682.33	13,391,807.81	14,242,187.61	15,153,687.62	16,138,677.31	17,236,107.37	18,442,634.88
	➤ Laju Inflasi	%	12.68	11.00	10.00	9.00	8.00	7.00	6.40
	➤ Ketimpangan Kemakmuran (Indkes Gini)	%	0.2637	0.2571	0.2531	0.2470	0.2425	0.2375	0.2345
	➤ Pemerataan Pendapatan (versi Bank Dunia)	%	24.3	25.5	26.5	28.5	30.5	31.5	33.15
3	Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan:								
a.	Angka Melek Huruf	%	98.48	98.60	98.80	99	99.50	99.70	100
b.	Angka Partisipasi Kasar :								
	- SD/MI		109.71	110	112	114	116	118	120.00
	- SLTP/MTs	%	79.91	80	82	84	86	88	90.00
	- SMA/SMK/MA	%	69.36	70	71	72	73	74	75.00
c.	Angka Partisipasi Murni :								
	- SD/MI	%	91.34	92.5	93.5	95	96.5	98	99.00
	- SLTP/MTs	%	57.06	60	65	70	74.5	75.5	80.00
	- SMA/SMK/MA	%	48.46	50	52.5	54	55.5	57.5	60.00
d.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan								
	- SD/MI	%	99.74	99.80	90.85	90.90	90.95	90.97	100
	- SLTP/MTs	%	90.65	91	92	93.5	94	94.5	95.00
	- SMA/SMK/MA	%	88.42	89	89.70	90.50	91.70	92.30	93.00
e.	Pendidikan dasar:								
	- Angka partisipasi sekolah	1/1000	72.44	80	82	84	86	88	90%
	- Rasio ketersediaan seko-lah/penduduk usia sekolah	1/10000	44.56	46	48	50	54	57	60.00
	- Rasio guru/murid	1/1000	55.45	57.5	59	62	65	67	70
	- Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1/1000	0.02	0.028	0.032	0.036	0.040	0.045	0.05
f.	Pendidikan menengah (SMP):								
	- Angka partisipasi sekolah	1/1000	63.61	64	65	66	67	68	70.0
	- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1/10000	19.42	21	22.5	23.5	25.5	27.5	30.00
	- Rasio guru terhadap murid	1/1000	84.06	85	85.5	86.5	87.5	88.5	90.00
	- Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1/1000	0.12	0.124	0.126	0.128	0.130	0.132	0.134
g.	Pendidikan menengah (SMA)								
	- Angka partisipasi sekolah	1/1000	58.92	63	65	68	70	73	75.00
	- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1/10000	16.33	17	17.5	18.5	19	19.5	20
	- Rasio guru terhadap murid	1/1000	104.8	105	106	107	108	109	110
	- Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1/1000	0.09	0.093	0.095	0.097	0.10	0.103	0.105
2.	Kesehatan:								
a.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	71.4	74	77	81	85	90	95
b.	Angka Usia Harapan Hidup	%	69.8	70	70.3	70.8	71.50	71.75	72
c.	% Balita Gizi Buruk	%	1.6	1	0	0	0	0	0
d.	Rasio posyandu per satuan balita	1/1000	9.69	10	11	12	13	14	15
e.	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk.	1/1000	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
f.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1/10000	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
g.	Rasio dokter per satuan penduduk	1/1000	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
h.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1/1000	0.62	0.63	0.645	0.66	0.67	0.685	0.70

**PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT URUSAN DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2010**

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN 2010
	URUSAN WAJIB	250,666,000,000.00
1	PENDIDIKAN	15,523,957,000.00
	DINAS PENDIDIKAN	15,523,957,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,073,797,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,700,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,000,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3,500,000.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	550,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	590,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,957,000.00
	Penyediaan Peralatan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Makan dan Minuman	15,000,000.00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	97,640,000.00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200,000,000.00
	Penyediaan Peralatan Kebersihan	34,000,000.00
	Peningkatan Jasa Pelayanan Publik	423,000,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	294,000,000.00
	Pembangunan Gedung Kantor	49,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	45,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	200,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,600,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Serta Perlengkapannya	1,600,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85,000,000.00
	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	25,000,000.00
	Validasi Data Aset	60,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35,000,000.00
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	35,000,000.00
	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4,220,200,000.00
	Penyediaan Beasiswa Transisi	485,000,000.00
	Pembangunan SD 01/09 Bandar Buat	265,000,000.00
	Pembangunan SD 32 Bungo Pasang	250,000,000.00
	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	87,000,000.00
	Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah TP 2008/2009	1,300,000,000.00
	Pengadaan Buku Agenda Didikan Subuh dan Peserta Ramadhan	350,000,000.00
	Mengadakan Rehabilitasi Sekolah Melalui DAK	504,300,000.00
	Pendamping Bantuan Jepang (JICA)	168,900,000.00
	Rintisan Sekolah Berstandar Internasional	100,000,000.00
	Pengadaan Meubiler SMP	90,000,000.00
	Peningkatan Kompetensi Guru Kls 1	90,000,000.00
	Peningkatan Kompetensi Kepala SD	90,000,000.00
	Bantuan Rehab SSN	400,000,000.00
	Peningkatan Pctensi Anak Didik	40,000,000.00

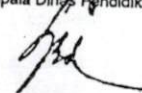
PROGRAM KEGIATAN SKPD DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008 S/D TAHUN ANGGARAN 2010

Program Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan								5 STRATEGI SASARAN	
No.	Tahun Anggaran 2008	Rp	No.	Tahun Anggaran 2009	Rp	No.	Tahun Anggaran 2010		Rp
	Jumlah Belanja Langsung	38,475,139,712.00			20,127,874,796.00			43,943,900,853.00	1. Rehabilitasi dan rekonstruksi pusat pemerintahan serta melaksanakan sistem pemerintahan yang baik dan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,965,214,675.00	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,735,151,000.00	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,347,577,468.00	2. Rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,605,715.00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000.00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000.00	3. Peningkatan sosial budaya masyarakat, pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	821,257,360.00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	789,345,000.00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,000,000,000.00	4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana perdagangan dan mendorong peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat invensi, pembinaan tenaga kerja, serta ketahanan pangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	1,500,000.00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,500,000.00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,500,000.00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	895,000,000.00		Penyediaan Alat Tulis Kantor	631,853,960.00		Penyediaan Alat Tulis Kantor	629,948,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	1,015,959,900.00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	650,000,000.00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	656,000,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6,957,500.00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,957,000.00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,957,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260,670,300.00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	872,534,000.00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	394,585,868.00	5. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana, penataan ruang, pemukiman, perhubungan dan pengendalian lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
	Penyediaan Makanan dan Minum	10,720,000.00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,760,000.00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,800,000.00	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	76,000,000.00		Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000.00		Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000.00	
	Pendukung Pelayanan Kantor / Koordinasi Dalam Daerah	234,720,000.00		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	102,601,040.00		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	315,975,000.00	
	Penyediaan Peralatan Kebersihan	27,181,000.00		Pendukung Pelayanan Kantor/Koordinasi Dalam Daerah	200,000,000.00		Pendukung Pelayanan Kantor/Koordinasi Dalam Daerah	163,920,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik	2,471,642,900.00		Penyediaan Peralatan Kebersihan	27,000,000.00		Penyediaan Peralatan Kebersihan	34,000,000.00	
	Pengadaan SIKD	20,000,000.00		Peningkatan Jasa Pelayanan Publik	423,000,000.00		Peningkatan Jasa Pelayanan Publik	64,011,600.00	
	Penyediaan Alat Praktek	100,000,000.00					Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor	38,280,000.00	
	Pengadaan Program Sistem Informasi Manajemen	20,000,000.00	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390,384,385.00				
				Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec.Luki	49,000,000.00	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	611,349,000.00	
#	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227,900,000.00		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,000,000.00		Pembangunan Gedung Kantor	90,000,000.00	
	Pembangunan Gedung Kantor	49,000,000.00		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	159,050,000.00		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gedung Kantor Akibat Gempa (SKB Padang Timur)	90,000,000.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27,100,000.00		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gedung Kantor	32,334,385.00		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gedung Kantor Akibat Gempa (SKB Lubuk Begalung)	90,000,000.00	


Program Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan

No.	Tahun Anggaran 2008	Rp	No.	Tahun Anggaran 2009	Rp	No.	Tahun Anggaran 2010	Rp	5 STRATEGI SASARAN
							Peningkatan Minat Baca, Pembinaan Kreativitas dan Mental Siswa Pasca Gempa	127,875,000.00	
						9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100,000,000.00	
							Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	100,000,000.00	

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Drs. Bambang Sutrisno, M.Pd
NIP. 19580830 198503 1 004

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2010		

Urusan Pemerintahan : 1 01 - PENDIDIKAN
 Organisasi : 1 01.01 - DINAS PENDIDIKAN

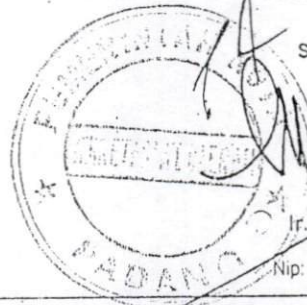
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	453.983.561.257,23
5.	BELANJA	434.331.415.989,23
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	434.331.415.989,23
5.1.1.	Belanja Pegawai	19.652.145.268,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.878.105.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	7.702.478.818,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.071.561.050,00
5.2.3.	Belanja Modal	
	JUMLAH BELANJA	453.983.561.257,23
	SURPLUS/(DEFISIT)	(453.983.561.257,23)

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung	115.775.702.798,48	123.683.207.593,80	99.933.002.798,48	94.939.502.798,47	434.331.415.989,23
2.2	Belanja Langsung	97.248.000,00	12.946.000.155,00	5.480.321.513,00	1.128.567.000,00	19.652.145.268,00
3.1	Penorimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PADANG, 05 Februari 2010

Menyetujui,
Sekretaris Daerah



Ir. H. Emzalmi, M.Si

Nip: 19520928 197310 1 001



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NO DPA SKPD

1.01.1.01.01.20.00.5.2

Formulir

DPA-SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

Urutan Pemerintahan : 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Program : 1.01.1.01.01.20. - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan : 1.01.1.01.01.20.00. - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Waktu Pelaksanaan : 01 April 2010 - Sampai dengan 30 September 2010

Lokasi Kegiatan : Kota Padang

Sumber Dana : DAU

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	
Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya pelatihan Schoolnet sebanyak 194 Orang	Peningkatan SDM Sekolah
Hasil	Sekolah Dapat Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkualitas	Proses Belajar Mengajar Meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan :		

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	DELANJA LANGSUNG				60.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.925.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.925.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.925.000,00
	Pelaksana :				
	Pemangkuang Jawati	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	Pujabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.00	ok	450.000,00	450.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	275.000,00	275.000,00
	Anggota	7.00	ok	150.000,00	1.050.000,00
	Pendukung :				
	Ketua Pengarah	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Anggota Tim Pengarah	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				5.000.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber				5.000.000,00
	Narasumber	50.00	Ort	100.000,00	5.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				52.075.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.815.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				3.467.700,00
	Tinta Cannon	1.00	buah	275.000,00	275.000,00
	Tinta HP LaserJet	2.00	buah	650.000,00	1.300.000,00
	Tip-Ex	2.00	buah	13.200,00	26.400,00
	Map Snelhecter Folio	20.00	buah	6.600,00	132.000,00
	Amplop Putih	4.00	kotak	16.500,00	66.000,00
	Spidol Whiteboard	2.00	buah	8.000,00	16.000,00
	Clip Paper Jumbo	1.00	buah	5.500,00	5.500,00
	Bindor Clip	2.00	kotak	9.000,00	18.000,00
	Isi Stapler	1.00	kotak	15.000,00	15.000,00
	Kertas Folio Bergaris	2.00	rim	27.500,00	55.000,00
	Kertas HVS Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00
	Alat Tulis Peserta Pelatihan School Net	194.00	Ort	7.500,00	1.455.000,00
	PM	1.00	LS	3.800,00	3.800,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				120.000,00
	Materai @Rp 6.000,-	20.00	lembar	6.000,00	120.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi				220.000,00
	Film	2.00	roll	25.000,00	50.000,00
	Cuci Cetak Film	72.00	lembar	1.500,00	108.000,00
	Album	2.00	buah	35.000,00	70.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				15.330.000,00
5.2.2.03.23.	Belanja Transportasi/ uang saku				15.330.000,00
	Transportasi Peserta (219 orang X 2 hari)	438.00	Ort	35.000,00	15.330.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.979.300,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.979.300,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pengadaan Materi Pelatihan	10,437.00	lembar	250,00	2.609.250,00
	Peluporan	1,980.00	lembar	250,00	495.000,00
	Fotocopy Surat-surat Edaran	7,500.00	lembar	250,00	1.875.000,00
	PM	1.00	LS	50,00	50,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Tempat	1.00	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.500.000,00
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System / Internet	10.00	hari	350.000,00	3.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				23.450.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan Peserta, Panitia dan Narasumber (360 orang X 2 hari X 1 kali)	720.00	OKK	17.500,00	12.600.000,00
	Minuman dan Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (360 orang X 2 hari X 2 kali)	1.440.00	OKK	7.500,00	10.800.000,00
	PM	1.00	LS	50.000,00	50.000,00
					60.000.000,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. Hj. Corri Saidani, M.Si
NIP: 19661023 199202 2 002

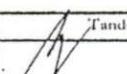
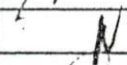



Drs. H.-M. Nur Amin, M.Pd
NIP: 19520509-197703 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	
Triwulan II	Rp.	57.075.000,00
Triwulan III	Rp.	2.925.000,00
Triwulan IV	Rp.	
Jumlah	Rp.	60.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AFRIZAL BR	19630511 198810 1 002	Kabag. Pembangunan Setda Kota	
2	SYAHRUL, SE, MSI	19660103 198601 1 001	Sekretaris BAPPEDA Kota Padang	
3	ELVIRA, SE, AKT, MSI	19690919 199701 2 002	Kabid. Anggaran DPKA Kota Padang	

PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

Uraian	Anggaran 2007	Realisasi 2007	%	Realisasi 2006
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah	66,153,415,530.00	69,540,855,976.00	105.12	63,586,171,401.00
Retribusi Daerah	23,797,608,000.00	22,016,799,635.25	92.52	21,378,618,722.00
Penadapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dinisahkan	3,308,614,943.00	3,308,613,943.00	100.00	3,698,527,038.00
Lain-lain PAD yang Syah	9,598,890,676.00	11,604,898,301.50	120.90	9,882,881,124.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102,858,529,149.00	106,471,167,855.75	103.51	98,546,198,285.00
PENDAPATAN TRANSFER				
1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
Bagi Hasil Pajak	35,348,525,380.00	55,643,443,323.00	157.41	39,451,385,762.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	500,000,000.00	1,330,209,250.00	266.04	642,892,739.00
Dana Alokasi Umum	565,100,000,000.00	565,100,000,000.00	100.00	503,906,000,000.00
Dana Alokasi Khusus	35,574,000,000.00	32,293,800,000.00	90.78	26,050,000,000.00
Sub Jumlah	636,522,525,380.00	654,367,452,573.00	102.80	570,050,278,501.00
2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
Dana Penyesuaian AD HOC	5,000,000,000.00	10,089,679,400.00	201.79	0.00
Sub Jumlah	5,000,000,000.00	10,089,679,400.00	201.79	0.00
3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23,895,000,000.00	23,429,896,325.87	98.05	22,751,620,379.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	10,837,378,712.00	10,837,378,712.00	100.00	0.00
Sub Jumlah	34,732,378,712.00	34,267,275,037.87	98.66	22,751,620,379.00
Jumlah Pendapatan Transfer	676,254,904,092.00	698,724,407,010.87	103.32	592,801,898,880.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SYAH				
Pendapatan Hibah	2,085,000,000.00	7,066,910,000.00	338.94	15,120,000,000.00
Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidi dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Pilkada Tahap I dan II	0.00	0.00	0.00	385,862,000.00
Jumlah	2,085,000,000.00	7,066,910,000.00	338.94	15,505,862,000.00
JUMLAH PENDAPATAN	781,198,433,241.00	812,262,484,866.62	103.98	706,853,959,165.00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	484,334,376,792.79	448,404,510,313.00	92.58	360,906,971,051.00
Belanja Barang	155,996,982,537.00	129,572,953,287.00	83.06	139,410,858,471.00
Bunga	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00	903,299,840.00
Subsidi	700,000,000.00	100,000,000.00	14.29	0.00
Hibah	20,148,500,000.00	19,874,062,700.00	98.64	0.00
Bantuan Sosial	14,107,675,000.00	13,662,168,200.00	96.84	27,588,417,875.00
Bantuan Keuangan	847,200,000.00	756,000,000.00		
J u m l a h	676,884,734,329.79	613,119,694,500.00	90.58	528,809,547,237.00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	31,439,990,416.00	24,035,660,185.00	76.45	12,054,895,838.00
Belanja Peralatan dan Mesin	29,380,566,300.00	28,906,761,564.00	98.39	23,250,617,341.00
Belanja Gedung dan Bangunan	51,844,360,120.00	37,085,695,968.30	71.53	11,496,403,937.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37,717,210,260.00	28,856,018,990.00	76.51	29,723,631,725.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4,672,963,950.00	4,630,759,800.00	99.10	5,947,451,650.00
J u m l a h	155,055,091,046.00	123,514,896,507.30	79.66	82,478,000,491.00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	3,018,663,450.00	60.37	3,152,516,650.00
J u m l a h	5,000,000,000.00	3,018,663,450.00	60.37	3,152,516,650.00
JUMLAH BELANJA	836,939,825,375.79	739,653,254,457.30	88.38	614,440,064,378.00

Uraian	Anggaran 2007	Realisasi 2007	%	Realisasi 2006
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Retribusi	650,000,000.00	650,000,000.00	100.00	0.00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				0.00
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	650,000,000.00	650,000,000.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA & TRANSFER	837,589,825,375.79	740,303,254,457.30	88.38	614,440,064,378.00
SURPLUS / (DEFISIT)	(56,391,392,134.79)	71,959,230,409.32	(127.61)	92,413,894,787.00
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	92,253,900,947.79	92,253,900,947.79	100.00	4,129,721,998.79
Pencaliran Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dinysahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	6,605,458,723.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah penerimaan	98,859,359,670.79	92,253,900,947.79	93.32	4,129,721,998.79
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	7,764,801,000.00	7,764,801,000.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pem. Daerah	16,700,000,000.00	4,544,000,000.00	27.21	1,000,000,000.00
Pembay. Pokok Pinj. DN Lainnya	18,003,166,536.00	17,817,830,400.00	98.97	3,289,715,838.00
Pembay. Pokok Pinj. DN Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pengeluaran	42,467,967,536.00	30,126,631,400.00	70.94	4,289,715,838.00
PEMBIAYAAN NETTO	56,391,392,134.79	62,127,269,547.79	110.17	(159,993,839.21)
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	134,086,499,957.11		92,253,900,947.79

KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN	922,411,851,098.00	918,857,414,760.77	(3,554,436,337.23)	99.61
Pendapatan Asli Daerah	128,469,134,954.00	117,728,886,788.00	(10,740,248,166.00)	91.64
Pajak Daerah	80,146,337,803.00	76,795,691,361.00	(3,350,646,442.00)	95.82
Restribusi Daerah	30,916,695,824.00	24,793,292,954.00	(6,123,402,870.00)	80.19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,788,864,957.00	3,788,864,957.00	-	100.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	13,617,236,370.00	12,351,037,516.00	(1,266,198,854.00)	90.70
Dana Perimbangan	723,986,750,000.00	727,341,517,061.00	3,354,767,061.00	100.46
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,515,660,000.00	58,870,431,061.00	3,354,771,061.00	106.04
Dana Alokasi Umum	624,642,090,000.00	624,642,086,000.00	(4,000.00)	100.00
Dana Alokasi Khusus	43,829,000,000.00	43,829,000,000.00	-	100.00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	69,955,966,144.00	73,787,010,911.77	3,831,044,767.77	105.48
Hibah	7,500,000,000.00	9,500,000,000.00	2,000,000,000.00	126.67
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemerintah Daerah Lainnya	32,132,938,766.00	36,022,606,927.77	3,889,668,161.77	112.10
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,399,448,000.00	5,439,901,000.00	40,453,000.00	100.75
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	24,923,579,378.00	22,824,502,984.00	(2,099,076,394.00)	91.58
Jumlah Pendapatan	922,411,851,098.00	918,857,414,760.77	(3,554,436,337.23)	99.61
BELANJA DAERAH	1,010,677,264,245.24	881,727,534,947.00	(128,949,729,298.24)	87.24
Belanja Tidak Langsung	649,852,592,560.24	595,748,178,906.00	(54,104,413,654.24)	91.67
Belanja Pegawai	552,201,078,282.24	532,700,493,308.00	(19,500,584,974.24)	96.47
Belanja Bunga	700,000,000.00	-	(700,000,000.00)	-
Belanja Subsidi	250,000,000.00	-	(250,000,000.00)	-
Belanja Hibah	31,745,614,278.00	29,146,952,730.00	(2,598,661,548.00)	91.81
Belanja Bantuan Sosial	14,054,500,000.00	13,169,089,000.00	(885,411,000.00)	93.70
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah	45,901,400,000.00	20,215,514,650.00	(25,685,885,350.00)	44.04
Belanja Tidak terduga	5,000,000,000.00	516,129,218.00	(4,483,870,782.00)	10.32
Belanja Langsung	360,824,671,685.00	285,979,356,041.00	(74,845,315,644.00)	79.26
Belanja Pegawai	48,906,566,041.00	40,334,167,240.00	(8,572,398,801.00)	82.47
Belanja Barang dan Jasa	146,579,633,524.00	125,309,992,023.00	(21,269,641,501.00)	85.49
Belanja Modal	165,338,472,120.00	120,335,196,778.00	(45,003,275,342.00)	72.78
Jumlah Belanja	1,010,677,264,245.24	881,727,534,947.00	(128,949,729,298.24)	87.24
Surplus / (Defisit)	(88,265,413,147.24)	37,129,879,813.77	125,395,292,961.01	(42.07)
PEMBIAYAAN DAERAH	88,265,413,147.24	120,200,724,145.37	31,935,310,998.13	136.18
Penerimaan Pembiayaan	141,851,300,957.11	141,864,242,292.11	12,941,335.00	100.01
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	134,086,499,957.11	134,086,499,957.11	-	100.00
Pencairan dana Cadangan	7,764,801,000.00	7,777,742,335.00	12,941,335.00	100.17
Sil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	141,851,300,957.11	141,864,242,292.11	12,941,335.00	100.01
Pengeluaran Pembiayaan	53,585,887,809.87	21,663,518,146.74	(31,922,369,663.13)	40.43
Pembentukan Dana Cadangan	20,000,000,000.00	-	(20,000,000,000.00)	-
Pembayaran Modal (Investasi) Pemerintah daerah	4,946,000,000.00	1,000,000,000.00	(3,946,000,000.00)	20.22
Pembayaran Pokok Utang	28,639,887,809.87	20,663,518,146.74	(7,976,369,663.13)	72.15
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	53,585,887,809.87	21,663,518,146.74	(31,922,369,663.13)	40.43
Pembiayaan Neto	88,265,413,147.24	120,200,724,145.37	31,935,310,998.13	136.18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan(SiLPA)	0	157,330,603,959.14		

Padang, 20 Oktober 2009

Walikota Padang

FAUZI BAHAR

PEMERINTAH KOTA PADANG
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2008

Halaman : 1-3

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	867.223.442.000,00	922.411.851.098,00	55.188.409.098,00	6,36
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	116.236.692.000,00	128.469.134.954,00	12.232.442.954,00	10,52
4.1.1.	Pajak Daerah	71.220.000.000,00	80.146.337.803,00	8.926.337.803,00	12,53
4.1.2.	Retribusi Daerah	29.071.684.324,00	30.916.695.824,00	1.845.011.500,00	6,35
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	3.788.864.957,00	(211.135.043,00)	(5,28)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.945.007.676,00	13.617.236.370,00	1.672.228.694,00	14,00
4.2.	Dana Perimbangan	723.986.750.000,00	723.986.750.000,00		
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.515.660.000,00	55.515.660.000,00		
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	624.642.090.000,00	624.642.090.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.829.000.000,00	43.829.000.000,00		
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.000.000.000,00	69.955.966.144,00	42.955.966.144,00	159,10
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	7.500.000.000,00	5.500.000.000,00	275,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.000.000.000,00	32.132.938.766,00	7.132.938.766,00	28,53
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		5.399.448.000,00	5.399.448.000,00	
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		24.923.579.378,00	24.923.579.378,00	

1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
5.	BELANJA DAERAH	867.223.442.000,00	922.411.851.098,00	55.188.409.098,00	6,36
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	905.872.379.597,00	1.010.677.264.245,24	104.804.884.648,24	11,57
5.1.1.	Belanja Pegawai	579.649.873.645,00	649.852.592.560,24	70.202.718.915,24	12,11
5.1.2.	Belanja Bunga	525.783.073.645,00	552.201.078.282,24	26.418.004.637,24	5,02
5.1.3.	Belanja Subsidi	700.000.000,00	700.000.000,00		
5.1.4.	Belanja Hibah		250.000.000,00	250.000.000,00	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	19.799.600.000,00	31.745.614.278,00	11.946.014.278,00	60,33
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	13.070.000.000,00	14.054.500.000,00	984.500.000,00	7,53
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	17.297.200.000,00	45.901.400.000,00	28.604.200.000,00	165,37
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67
5.2.1.	Belanja Pegawai	326.222.505.952,00	360.824.671.685,00	34.602.165.733,00	10,61
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.486.362.635,00	48.906.566.041,00	(3.579.796.594,00)	(6,82)
5.2.3.	Belanja Modal	137.669.847.166,00	146.579.633.524,00	8.909.786.358,00	6,47
	JUMLAH BELANJA	136.066.296.151,00	165.338.472.120,00	29.272.175.969,00	21,51
	SURPLUS/(DEFISIT)	905.872.379.597,00	1.010.677.264.245,24	104.804.884.648,24	11,57
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(38.648.937.597,00)	(88.265.413.147,24)	(49.616.475.550,24)	128,38
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	58.969.937.597,00	141.851.300.957,11	82.881.363.360,11	140,55
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	58.969.937.597,00	141.851.300.957,11	82.881.363.360,11	140,55
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	46.205.136.597,00	134.086.499.957,11	87.881.363.360,11	190,20
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	7.764.801.000,00	7.764.801.000,00		

1	2	3	4	5	6
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.321.000.000,00	53.585.887.809,87	33.264.887.809,87	163,70
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.946.000.000,00	4.946.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,75)
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	12.375.000.000,00	28.639.887.809,87	16.264.887.809,87	131,43
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.321.000.000,00	53.585.887.809,87	33.264.887.809,87	163,70
	PEMBIAYAAN NETO	38.648.937.597,00	88.265.413.147,24	49.616.475.550,24	128,38
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Padang, 09 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

No. Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	903.506.052.893,00	957.275.976.959,10	53.769.924.066,10	105,95
1.1	Pendapatan Asli Daerah	133.164.566.383,00	113.254.710.508,83	(19.909.855.874,17)	85,05
1.1.1	Pajak Daerah	84.834.491.366,00	71.868.752.249,00	(13.167.739.117,00)	84,48
1.1.2	Retribusi Daerah	28.124.123.573,00	21.834.604.849,00	(6.289.518.724,00)	77,64
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.718.294.398,00	4.741.733.453,07	23.439.055,07	100,50
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15.487.657.046,00	15.011.619.957,78	(476.037.088,24)	96,93
1.2	Dana Perimbangan	721.652.606.324,00	732.818.465.504,00	11.165.849.180,00	101,55
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.715.988.324,00	58.882.837.504,00	11.166.849.180,00	123,40
2.2	Dana Alokasi Umum	628.472.618.000,00	628.472.618.000,00	-	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	45.464.000.000,00	45.463.000.000,00	(1.000.000,00)	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	48.688.880.186,00	111.202.810.946,27	62.513.930.760,27	228,39
3.1	Hibah	-	14.550.439.708,27	14.550.439.708,27	-
3.2	Dana Darurat	-	33.471.114.000,00	33.471.114.000,00	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemerintah Daerah Lainnya	43.498.122.549,00	39.288.455.945,00	(4.209.666.604,00)	90,32
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.855.174.344,00	21.493.518.000,00	18.638.343.656,00	752,79
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2.335.583.293,00	2.399.283.293,00	63.700.000,00	102,73
	Jumlah Pendapatan	903.506.052.893,00	957.275.976.959,10	53.769.924.066,10	105,95
2	BELANJA DAERAH	1.050.192.704.013,14	996.418.374.351,00	(53.774.329.662,14)	94,88
2.1	Belanja Tidak Langsung	721.681.904.245,14	710.395.548.722,00	(11.286.355.523,14)	98,44
1.1	Belanja Pegawai	624.451.921.620,14	601.830.540.570,00	(22.621.381.050,14)	96,38
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	37.450.950.000,00	32.740.446.500,00	(4.710.503.500,00)	87,42
1.5	Belanja Bantuan Sosial	14.457.500.000,00	13.343.255.798,00	(1.114.244.202,00)	92,29
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah	45.173.820.350,00	33.925.179.565,00	(11.248.640.785,00)	75,10
1.8	Belanja Tidak terduga	147.712.275,00	28.556.126.289,00	28.408.414.014,00	19.332,26
2.2	Belanja Langsung	328.510.799.768,00	286.022.825.629,00	(42.487.974.139,00)	87,07
2.1	Belanja Pegawai	46.608.289.569,60	39.755.141.449,00	(6.853.148.120,60)	85,30
2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.792.694.912,40	145.915.497.251,00	(19.877.197.661,40)	88,01
2.3	Belanja Modal	116.109.815.286,00	100.352.186.929,00	(15.757.628.357,00)	86,43
	Jumlah Belanja	1.050.192.704.013,14	996.418.374.351,00	(53.774.329.662,14)	94,88
	Surplus / (Defisit)	(146.686.651.120,14)	(39.142.397.391,90)	107.544.253.728,24	26,68
3	PEMBIAYAAN DAERAH	146.686.651.120,14	146.490.693.301,14	(195.957.819,00)	99,87
1	Penerimaan Pembiayaan	157.330.603.959,14	157.097.763.438,14	(232.840.521,00)	99,85
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	157.330.603.959,14	157.097.763.438,14	(232.840.521,00)	99,85
2	Pencairan dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	157.330.603.959,14	157.097.763.438,14	(232.840.521,00)	99,85
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.643.952.839,00	10.607.070.137,00	(36.882.702,00)	99,65
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	377.489.778,00	377.489.778,00	-	100,00
3	Pembayaran Pokok Utang	10.266.463.061,00	10.229.580.359,00	(36.882.702,00)	99,64
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.643.952.839,00	10.607.070.137,00	(36.882.702,00)	99,65
	Pembiayaan Neto	146.686.651.120,14	146.490.693.301,14	(195.957.819,00)	99,87
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan(SILPA)	0	107.348.295.909,24	-	-

Padang, Pebruari 2010

Walikota Padang

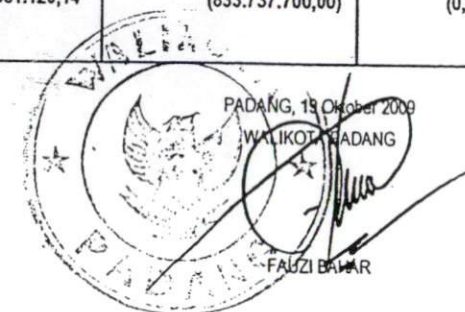
FAUZI BAHAR

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Halaman : 1-2

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan ke-2	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	891.180.008.922,00	903.506.052.893,00	12.326.043.971,00	1,38
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.183.034.578,00	133.164.566.383,00	981.531.805,00	0,74
4.1.1.	Pajak Daerah	86.368.775.194,00	84.834.491.366,00	(1.534.283.828,00)	(1,78)
4.1.2.	Retribusi Daerah	28.332.082.384,00	28.124.123.573,00	(207.958.811,00)	(0,73)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	4.718.294.398,00	218.294.398,00	4,85
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.982.177.000,00	15.487.657.046,00	2.505.480.046,00	19,30
4.2.	DANA PERIMBANGAN	720.667.118.000,00	721.652.606.324,00	985.488.324,00	0,14
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.730.500.000,00	47.715.988.324,00	985.488.324,00	2,11
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	628.472.618.000,00	628.472.618.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	45.464.000.000,00	45.464.000.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.329.856.344,00	48.688.880.186,00	10.359.023.842,00	27,03
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	36.132.000.000,00	43.498.122.549,00	7.366.122.549,00	20,39
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.197.856.344,00	2.855.174.344,00	657.318.000,00	29,91
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		2.335.583.293,00	2.335.583.293,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	891.180.008.922,00	903.506.052.893,00	12.326.043.971,00	1,38
5.	BELANJA DAERAH	1.038.700.397.742,14	1.050.192.704.013,14	11.492.306.271,00	1,11
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	709.457.277.802,14	721.681.904.245,14	12.224.626.443,00	1,72
5.1.1.	Belanja Pegawai	633.329.457.452,14	624.451.921.620,14	(8.877.535.832,00)	(1,40)
5.1.4.	Belanja Hibah	15.657.900.000,00	37.450.950.000,00	21.793.050.000,00	139,18

1	2	3	4	5	6
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14.147.300.000,00	14.457.500.000,00	310.200.000,00	2,19
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	45.322.620.350,00	45.173.820.350,00	(148.800.000,00)	(0,33)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	147.712.275,00	(852.287.725,00)	(85,23)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	329.243.119.940,00	328.510.799.768,00	(732.320.172,00)	(0,22)
5.2.1.	Belanja Pegawai	48.490.332.151,60	46.608.289.569,60	(1.882.042.582,00)	(3,88)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.318.127.156,40	165.792.694.912,40	6.474.567.756,00	4,06
5.2.3.	Belanja Modal	121.434.660.632,00	116.109.815.286,00	(5.324.845.346,00)	(4,38)
	JUMLAH BELANJA	1.038.700.397.742,14	1.050.192.704.013,14	11.492.306.271,00	1,11
	SURPLUS/(DEFISIT)	(147.520.388.820,14)	(146.686.651.120,14)	833.737.700,00	(0,57)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	156.149.703.820,14	157.330.603.959,14	1.180.900.139,00	0,76
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	156.149.703.820,14	157.330.603.959,14	1.180.900.139,00	0,76
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	156.149.703.820,14	157.330.603.959,14	1.180.900.139,00	0,76
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	156.149.703.820,14	157.330.603.959,14	1.180.900.139,00	0,76
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.629.315.000,00	10.643.952.839,00	2.014.637.839,00	23,35
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		377.489.778,00	377.489.778,00	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	8.629.315.000,00	10.266.463.061,00	1.637.148.061,00	18,97
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.629.315.000,00	10.643.952.839,00	2.014.637.839,00	23,35
	PEMBIAYAAN NETO	147.520.388.820,14	146.686.651.120,14	(833.737.700,00)	(0,57)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				



Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang
189. 02 / DPRD-PDG/2010
29 Januari 2010
Ringkasan APBD Kota Padang
Tahun Anggaran 2010

No.	Uraian	RAPBD Tahun 2010	APBD 2010 Setelah Penyempurnaan
1	Pendapatan Daerah	1,226,401,965,795.93	1,226,401,965,795.93
	1. Pendapatan Asli Daerah	124,252,133,431.00	124,252,133,431.00
	2. Dana Perimbangan	720,105,266,836.00	720,034,727,000.00
	3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	382,044,565,528.93	382,115,105,364.93
2	Belanja Daerah	1,301,178,824,719.94	1,322,015,024,719.94
	1. Belanja Tidak Langsung	792,884,998,768.05	816,183,716,949.05
	2. Belanja Langsung	508,293,825,951.89	505,831,307,770.89
3	Surplus / (Defisit)	(74,776,858,924.01)	(95,613,058,924.01)
4	Pembiayaan Daerah	74,776,858,924.01	95,613,058,924.01
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	96,591,805,914.01	96,591,805,914.01
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21,814,946,990.00	978,746,990.00
	3. Pembiayaan Netto	74,776,858,924.01	95,613,058,924.01
	4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	0.00



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG

WAKIL KETUA

Masrul Rajo Intan
MASRUL RAJO INTAN

WAKIL KETUA

Budiman
BUDIMAN

WAKIL KETUA

Afrizal
AFRIZAL

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010

Hal 1 dari 2

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	1.226.401.965.795,93
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.252.133.431,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	77.783.503.917,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	26.394.267.977,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.700.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.374.361.537,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	720.034.727.000,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.401.770.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	632.117.457.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.515.500.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.115.105.364,93
4.3.1.	Pendapatan Hibah	129.713.936.285,93
4.3.2.	Dana Darurat	178.000.000.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	45.300.954.735,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.000.214.344,00
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	8.100.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.226.401.965.795,93
5.	BELANJA DAERAH	1.322.015.024.719,94
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	816.183.716.949,05
5.1.1.	Belanja Pegawai	676.161.476.164,05
5.1.4.	Belanja Hibah	46.872.630.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14.348.034.019,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	77.801.576.766,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	505.831.307.770,89

Uraian		Jumlah
Nomor Urut		3
1	2	
5.2.1.	Belanja Pegawai	38.587.858.330,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.155.862.625,60
5.2.3.	Belanja Modal	341.087.586.815,29
	Jumlah Belanja	1.322.015.024.719,94
	Surplus/(Defisit)	(95.613.058.924,01)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	95.613.058.924,01
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	96.591.805.914,01
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.591.805.914,01
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	96.591.805.914,01
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	978.746.990,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	978.746.990,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	978.746.990,00
	Pembiayaan neto	95.613.058.924,01
6.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00



PEMERINTAH KOTA PADANG

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

Hal : 1 dari 3

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.226.401.965.795,93	1.033.963.093.977,88	(192.438.871.818,05)	(15,69)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.252.133.431,00	120.926.262.740,93	(3.325.870.690,07)	(2,68)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	77.783.503.917,00	75.854.256.630,00	(1.929.247.287,00)	(2,48)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	26.394.267.977,00	27.066.516.238,00	672.248.261,00	2,55
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.700.000.000,00	5.293.729.120,00	593.729.120,00	12,63
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.374.361.537,00	12.711.760.752,93	(2.662.600.784,07)	(17,32)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	720.034.727.000,00	719.161.321.000,00	(873.406.000,00)	(0,12)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.401.770.000,00	43.528.364.000,00	(873.406.000,00)	(1,97)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	632.117.457.000,00	632.117.457.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.515.500.000,00	43.515.500.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.115.105.364,93	193.875.510.236,95	(188.239.595.127,98)	(49,26)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	129.713.936.285,93	17.634.941.829,95	(112.078.994.455,98)	(86,40)
4.3.2.	Dana Darurat	178.000.000.000,00	2.225.250.000,00	(175.774.750.000,00)	(98,75)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	45.300.954.735,00	40.918.387.768,00	(4.382.566.967,00)	(9,67)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.000.214.344,00	81.174.845.544,00	60.174.631.200,00	286,54
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	8.100.000.000,00	22.398.400.000,00	14.298.400.000,00	176,52

1	2	3	4	5	6
4.3.6.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)		24.655.685.095,00	24.655.685.095,00	
4.3.7.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		3.868.000.000,00	3.868.000.000,00	
4.3.8.	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.226.401.965.795,93	1.033.963.093.977,88	(192.438.871.818,05)	(15,69)
5.	BELANJA DAERAH	1.322.015.024.719,94	1.185.934.729.633,12	(136.080.295.086,82)	(10,29)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	816.183.716.949,05	831.562.300.131,05	15.378.583.182,00	1,88
5.1.1.	Belanja Pegawai	676.161.476.164,05	736.336.107.364,05	60.174.631.200,00	8,90
5.1.4.	Belanja Hibah	46.872.630.000,00	32.479.721.382,00	(14.392.908.618,00)	(30,71)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14.348.034.019,00	14.599.008.819,00	250.974.800,00	1,75
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	77.801.576.766,00	42.701.816.766,00	(35.099.760.000,00)	(45,11)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	5.445.645.800,00	4.445.645.800,00	444,56
5.2.	BELANJA LANGSUNG	505.831.307.770,89	354.372.429.502,07	(151.458.878.268,82)	(29,94)
5.2.1.	Belanja Pegawai	38.587.858.330,00	37.964.059.399,00	(623.798.931,00)	(1,62)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.155.862.625,60	145.869.306.001,39	19.713.443.375,79	15,63
5.2.3.	Belanja Modal	341.087.586.815,29	170.539.064.101,68	(170.548.522.713,61)	(50,00)
	JUMLAH BELANJA	1.322.015.024.719,94	1.185.934.729.633,12	(136.080.295.086,82)	(10,29)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(95.613.058.924,01)	(151.971.635.655,24)	(56.358.576.731,23)	58,94
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	95.613.058.924,01	151.971.635.655,24	56.358.576.731,23	58,94
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	96.591.805.914,01	152.348.295.909,24	55.756.489.995,23	57,72
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.591.805.914,01	107.348.295.909,24	10.756.489.995,23	11,14
6.1.4.	Perterimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.591.805.914,01	152.348.295.909,24	55.756.489.995,23	57,72
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	978.746.990,00	376.660.254,00	(602.086.736,00)	(61,52)
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		300.000.000,00	300.000.000,00	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	978.746.990,00	76.660.254,00	(902.086.736,00)	(92,17)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	978.746.990,00	376.660.254,00	(602.086.736,00)	(61,52)
	PEMBIAYAAN NETO	95.613.058.924,01	151.971.635.655,24	56.358.576.731,23	58,94

1	2	3	4	5	6
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Hal : 3 dari 3

